



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN



Jl. Pamenang No. 1-C Sukorejo, Ngasem, Kediri Telp. 0354-683756
Email: dinkes@kedirikab.go.id Website: dinkes.kedirikab.go.id - Kode pos: 64182

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN



Jl. Pamenang No. 1-C Sukorejo, Ngasem, Kediri Telp. 0354-683756
Email: dinkes@kedirikab.go.id Website: dinkes.kedirikab.go.id - Kode pos: 64182

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Rancangan Renstra ini akan menjadi acuan dalam penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri yang telah disusun. Rancangan Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2021-2026. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih dengan program, kegiatan dan indikator-indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sehingga nantinya dapat untuk menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Kediri. Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bidang di Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada BAPPEDA yang telah memverifikasi serta seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Tahun 2021-2026) ini. Mudah-mudahan dokumen ini benar-benar memberi manfaat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

Kediri, - - 2021
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

AHMAD KHOTIB
NIP. 19700324 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMABARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	8
2.1.1 Sekretaris	8
2.1.1.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9
2.1.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan.....	9
2.1.1.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
2.1.2 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	10
2.1.2.1 Kepala Seksi Keseahatan Keluarga dan Gizi	10
2.1.2.2 Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	10
2.1.2.3 Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	10
2.1.3 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	11
2.1.3.1 Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi....	11
2.1.3.2 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.....	12
2.1.3.3 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	12
2.1.4 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	12
2.1.4.1 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	13
2.1.4.2 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	13
2.1.4.3 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	13

2.1.5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.....	13
2.1.5.1	Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman	14
2.1.5.2	Kepala Seksi Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana	14
2.1.5.3	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan...	14
2.2	Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan	17
2.2.1	Sumber Daya Manusia Kesehatan	17
2.2.2	Sarana Prasarana	18
2.2.3	Pembiayaan Kesehatan.....	19
2.2.3.1	Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	19
2.2.3.2	Program Jaminan Kesehatan Nasional ..	21
2.2.3.3	Program Biakes Maskin (Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Maskin)	26
2.2.3.4	Dana Desa Kesehatan	28
2.2.3.5	Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten.....	29
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Kesehatan	30
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	31
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41

BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	43
6.1	Program Kegiatan	43
6.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	43
6.1.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ..	45
6.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	46
6.1.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	47
6.1.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	48
6.2	Pendanaan	48
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	49
BAB VIII	PENUTUP	50

Lampiran Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Lampiran Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun
2016-2020

Lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD 2021-
2026

Lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif
SKPD 2021-2026

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Kediri Tahun 2020	18
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	51
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri 2016 – 2018	53
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2019 – 2020	59
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020 – 2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan.....	35
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026.....	40
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.....	61
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.....	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu prioritas pembangunan nasional maupun regional adalah pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari : Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya

dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamakan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

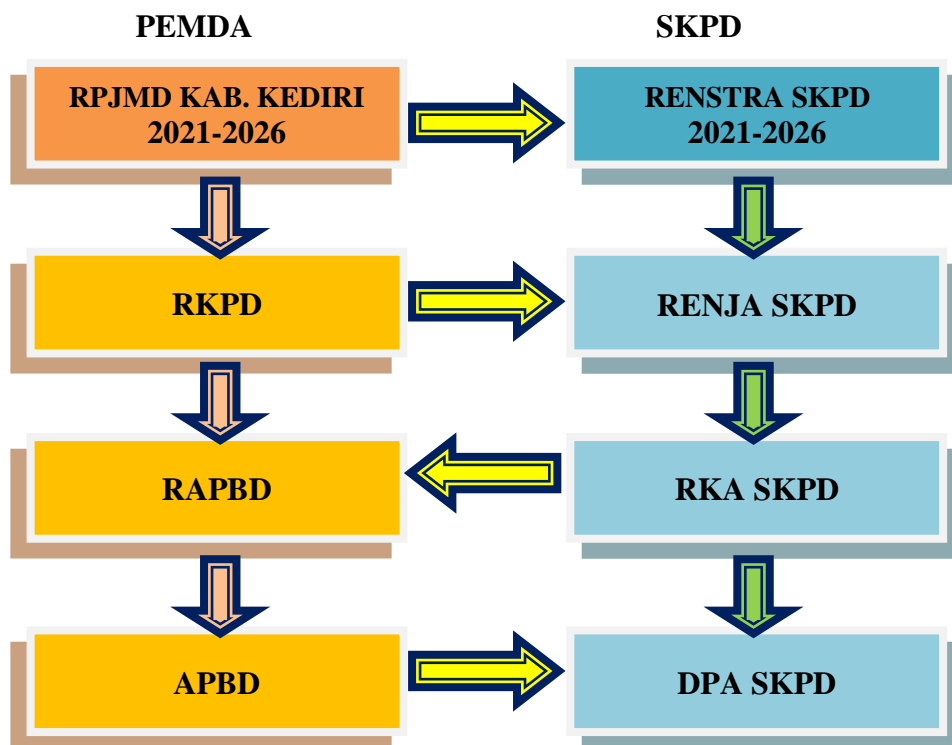
Dasar hukum dari proses penyusunan Renstra adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 17 dan Pasal 151. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Selain itu, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri. RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Setiap tahunnya, RPJMD

akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Dalam kaitan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Kediri akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan, berdasarkan Renja Dinas Kesehatan disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada bagan dibawah ini,



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2021 - 2026 didasarkan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 8) Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 17) Peraturan Bupati Kediri No 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021 – 2026 adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan, untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan peraturan daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Menjadi pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan dan pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh bidang/bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Hubungan Renstra Dinas kesehatan dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Kesehatan, Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini merupakan pokok dari Rencana Strategis yang menguraikan mengenai hasil rumusan visi, misi Bupati, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan berikut rencana pencapaian target indikatornya selama kurun waktu lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini merupakan pokok dari Rencana Strategis yang menguraikan mengenai hasil rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi penjelasan mengenai program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan berikut pendanaan untuk kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tentang indikator-indikator kinerja dari Dinas Kesehatan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan dari substansi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kesehatan;
3. Pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan;
7. Pembinaan UOBK RSUD dan UPT;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan kesehatan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

2.1.1 Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang, UOBK RSUD dan UPT;

- c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- i. penyusunan profil dinas; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

2.1.1.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

2.1.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

2.1.1.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2.1.2 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat.

Mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, dan masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. dan pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh 3 kepala seksi yaitu :

2.1.2.1 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

2.1.2.2 Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.2.3 Kepala seksi penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas untuk mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

2.1.3 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Mempunyai Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. dan pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dibantu oleh 3 kepala seksi sebagai berikut:

2.1.3.1 Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Surveilans dan Imunisasi.

2.1.3.2 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

2.1.3.3 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

2.1.4 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

Mempunyai Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang pelayanan kesehatan dibantu oleh 3 kepala seksi yaitu :

2.1.4.1 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang Pelayanan Kesehatan Primer.

2.1.4.2 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2.1.4.3 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

2.1.5 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Mempunyai Fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang sumber daya kesehatan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

2.1.5.1 Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman

Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan Kefarmasian, Makanan dan Minuman.

2.1.5.2 Kepala Seksi Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana.

2.1.5.3 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.

Selain jabatan struktural yang sudah disebutkan diatas Dinas Kesehatan juga mempunyai UOBK RSUD dan UPT yang membantu dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang kesehatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

UOBK RSUD merupakan unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang bertanggung jawab pada Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan barang milik Daerah serta kepegawaian.

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UOBK RSUD dan UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya:
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UOBK RSUD dan UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

UOBK RSUD terdiri dari :

1. UOBK RSUD Kabupaten Kediri;
2. UOBK RSUD Simpang Lima Gumul;

UPTD Kesehatan terdiri dari :

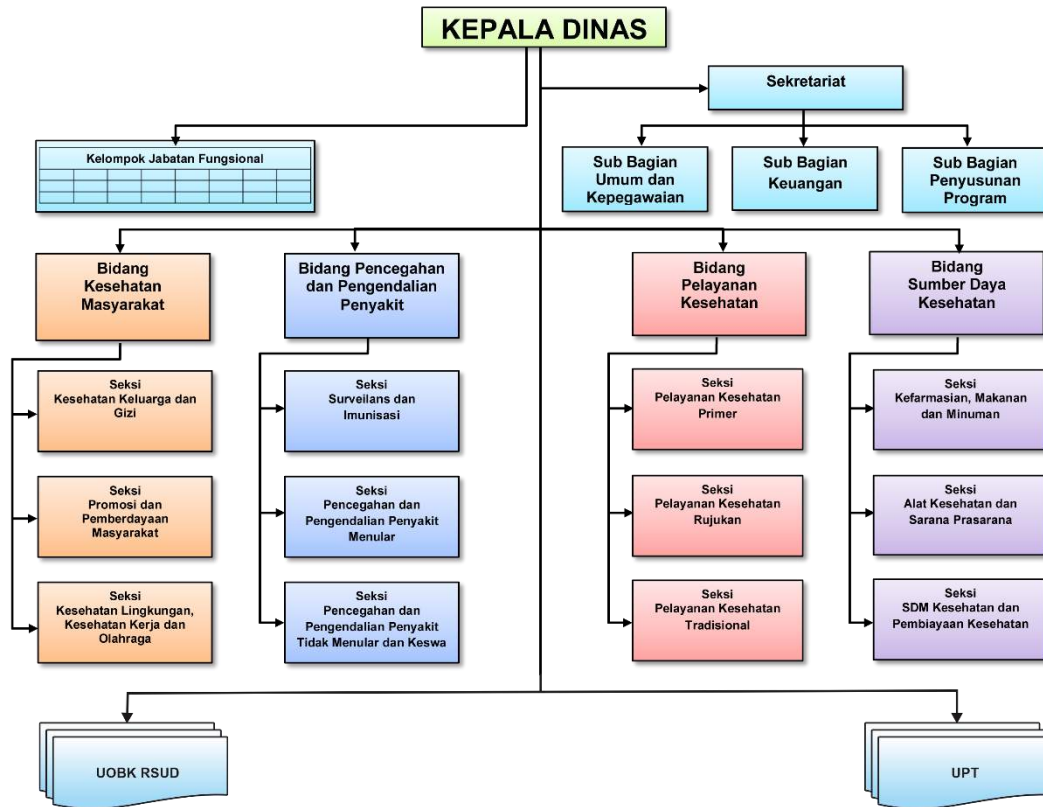
1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. UPTD Puskesmas; dan
3. UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, disajikan dalam Gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



2.2 SUMBER DAYA PADA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Informasi tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disajikan dalam Profil Kesehatan ini merupakan output dari aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang masih berbasis excel. Output tersebut dihasilkan dari input data SDM Kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta) di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dan diintegrasikan dengan data dari berbagai sistem informasi di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Unit Utama Kementerian Kesehatan, dan stakeholder lintas program dan lintas sektor terkait.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

Pada Permenkes tersebut bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Kediri Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1.	Bidan	490
2.	Perawat	268
3.	Dokter	83
4.	Dokter Gigi	47
5.	Tenaga Keteknisian Medis	52
6.	Tenaga Kefarmasian	67
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	46
8.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	59
9.	Tenaga Gizi	70
10.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	64
11.	Tenaga Penunjang Kesehatan	373

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan Puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya dan pembagian waktu kerja.

2.2.2 Sarana Prasarana

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri terletak di Jl. Pamenang No 1 C Katang Kabupaten Kediri, merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Sarana kesehatan lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yaitu gedung 37 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan, dan 1 IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten). Secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Puskesmas, dengan rincian:	37	
	a. Puskesmas Perawatan	8	
	b. Puskesmas non perawatan	29	
2.	Puskesmas Pembantu	80	
3.	Jumlah Posyandu Operasional	1.740	
4.	Jumlah Posbindu PTM	304	
5.	Puskesmas Keliling	50	

2.2.3 Pembiayaan Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan.

Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

2.2.3.1 Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Sudah hampir 6 (Enam) tahun Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara resmi sudah diimplementasikan sejak tanggal 01 Januari 2014 untuk memberikan jaminan kesehatan kepada peserta agar dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program JKN memang dapat dikatakan telah mampu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Program JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan transformasi dari PT Askes. JKN diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi social dan prinsip ekuitas.

Kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk dengan prinsip gotong royong. Dengan prinsip gotong royong diharapkan penduduk yang sehat membantu kepada penduduk yang sakit dan penduduk yang kaya membantu penduduk yang miskin sehingga mendukung terselenggaranya prinsip ekuitas (kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis) sehingga diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan

Kepesertaan JKN secara garis besar ada dua kategori yang masuk kepada peserta JKN Kesehatan yaitu, PBI dan bukan PBI . Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Sedangkan peserta bukan PBI merupakan peserta yang bukan tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu, diantaranya ialah pekerja penerima upah dan keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan keluarganya, serta

bukan pekerja dan anggota keluarganya. Diharapkan seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN atau mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019.

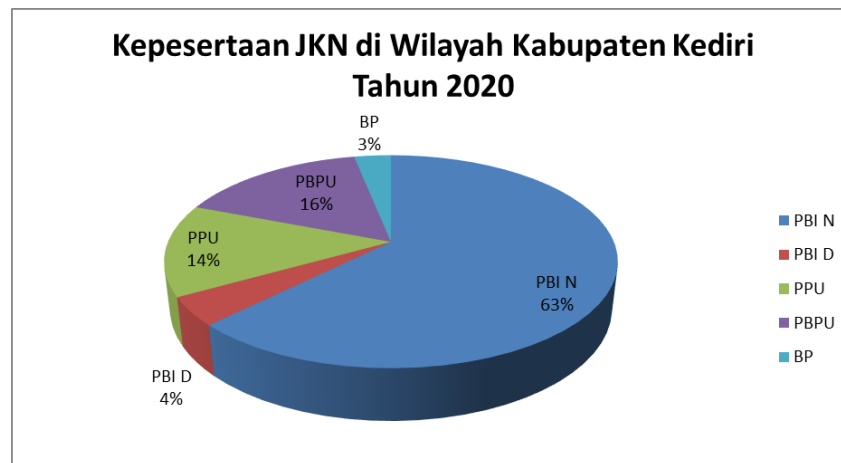
2.2.3.2 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sebagai akibat makin majunya ilmu dan teknologi kedokteran berakibat makin meningkatnya biaya kesehatan. Dan hal ini dapat mengakibatkan makin sulitnya masyarakat miskin untuk pemanfaatan layanan kesehatan. Padahal masyarakat miskin juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan termasuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 H. Untuk mengatasi permasalahan ini yang dinilai menjanjikan banyak harapan adalah penerapan program jaminan kesehatan. Tentang jaminan kesehatan ini pemerintah telah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam era JKN, Pemerintah telah menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu dengan pembiayaan dari dana APBN dengan nama Penerima Bantuan Iuran (PBI) sedang masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk kuota PBI JKN, Pemerintah Kabupaten Kediri juga menjamin kesehatannya dalam program PBI Daerah dimana iuran preminya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur. Selain itu apabila ada masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di wilayah Kabupaten Kediri yang tidak masuk dalam database PBI Pusat dan PBI Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin (Biakes Maskin).

Di Kabupaten Kediri, sudah banyak masyarakat miskin yang dicakup oleh program jaminan kesehatan. Dalam hal ini masyarakat miskin dan tidak mampu yang masuk sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Seperti yang terdapat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 2.1 Kepesertaan JKN di wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2020



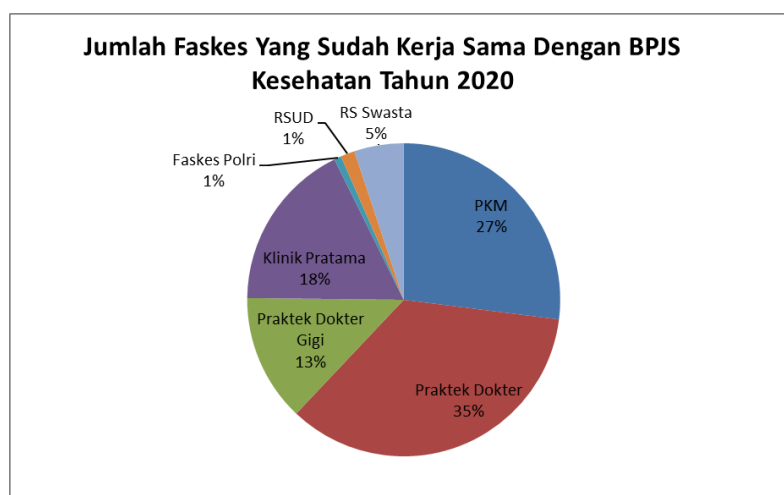
Sumber : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri, 2020

Dari gambar diagram pie di atas terlihat bahwa dari jumlah penduduk di wilayah kabupaten Kediri tahun 2020 sebesar 1.673.569, sudah hampir separuhnya 961.089 (57,43%) sudah menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta JKN paling banyak adalah program JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional sebanyak 63% atau sebesar 601.120 jiwa, kemudian diikuti oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang dikenal dengan Peserta Mandiri sebesar 16% atau sebesar 153.721 jiwa dan kemudian dari peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 14% atau sebesar 134.727 jiwa. Kemudian diikuti dari kepesertaan Bukan Pekerja (BP) sebesar 3% atau sebesar 30.143 jiwa. Dan yang terakhir adalah dari kepesertaan PBI Daerah sebanyak 41.378 jiwa atau hanya 4% saja.

Peserta PBI merupakan peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagian besar peserta PBI adalah penduduk miskin dan tidak mampu. Peserta PBI Pusat ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data peserta PBI bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kediri mengintegrasikan peserta Jamkesda ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 23.918 jiwa menjadi peserta PBI Daerah. Iuran premi peserta PBI Daerah akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Masyarakat di kabupaten Kediri sebagian juga ada yang belum menjadi Peserta JKN. Ada sebesar 737.269 jiwa atau 44,05% yang belum menjadi peserta JKN. Tentunya bagi masyarakat miskin yang belum menjadi Peserta JKN akan bertahap didaftarkan oleh Dinas Sosial menjadi Peserta PBI baik PBI Pusat ataupun PBI Daerah. Sedangkan bagi masyarakat yang mampu diharapkan mendaftarkan diri dan beserta keluarganya menjadi peserta JKN.

Gambar 2.2 Jumlah Faskes Yang Sudah Kerja Sama Dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2020



Sumber : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri, 2020

Faskes atau Fasilitas kesehatan merupakan suatu tempat seperti Rumah Sakit, Klinik ataupun Puskesmas yang menjadi pilihan kita untuk berobat jika sakit tentunya harus sudah terdaftar sebagai Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apabila dari Puskesmas atau Praktek Dokter atau Klinik tidak memadai untuk penanganannya biasa akan dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang lebih memadai dan lengkap. Disinilah tujuannya agar pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dapat lebih ditingkatkan. Ditahun 2020 sudah banyak Faskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN. Ada Rumah Sakit, Puskesmas, Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Klinik sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Seperti pada gambar diagram diatas sudah sebanyak 137 unit faskes yang tergabung dalam BPJS Kesehatan. Faskes dari Praktek Dokter sebesar 35% atau 48 unit sudah menjalin kerja sama dengan BPJS

Kesehatan. Begitu juga dengan 37 Puskesmas di wilayah kabupaten Kediri yang semua sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah yang berjumlah 2 buah semuanya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Begitu pula ada 7 buah (5%) Rumah Sakit Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Kediri juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani pelayanan lanjutan bagi peserta JKN.

Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (Komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik. Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan pelayanan Gawat Darurat. Adapun hasil dari pelayanan kesehatan bagi peserta PBI yang berkunjung di Puskesmas pada tahun 2020 seperti yang tercantum dalam grafik pie di bawah ini.

Gambar 2.3 Jumlah Kunjungan Peserta JKN di FKTP di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2020



Sumber : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Kediri, 2020

Sebagai program yang sudah berjalan hampir 6 tahun ini, program JKN menghadapi banyak tantangan. Pertama menyangkut perluasan kepesertaan. Hampir dari separuh penduduk kabupaten

Kediri belum masuk dalam dalam program JKN. Tantangan terbesar justru ada pada penduduk yang mampu dan kaya terutama yang sehat untuk turut dalam kepesertaan program JKN ini. Penduduk yang mampu ini diperkirakan memiliki kemauan yang rendah untuk membayar iuran premi JKN dan bergabung dalam program JKN karena berbagai factor. Perlunya sosialisasi yang terus menerus baik lewat media cetak maupun elektronik oleh BPJS Kesehatan agar mereka yang mampu ini untuk ikut dalam program JKN, terutama dalam hal sosialisasi manfaat yang diperoleh. Permasalahan yang kedua adalah soal penyiapan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lonjakan jumlah peserta JKN berpengaruh pada kunjungan dan penggunaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik dapat menimbulkan kekacauan pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Perlunya BPJS Kesehatan menambah kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dari Dokter Praktek Mandiri, Klinik-klinik swasta, Dokter Gigi praktek mandiri yang ada di kabupaten Kediri. Permasalahan yang ketiga adalah menyangkut pelayanan rujukan. Seperti yang kita ketahui, pelayanan dalam program JKN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari FKTP sampai faskes rujukan tingkat lanjut (FKTL). Tidak jarang peserta JKN atas kemauan sendiri meminta dirujuk ke FKTL padahal penyakitnya tersebut bisa diatasi oleh FKTP. Perlunya edukasi yang terus menerus kepada peserta terhadap penyakit-penyakit mana yang bisa dirujuk ke FKTL, karena hal itu terkait dengan kompetensi yang sudah ada di FKTP.

Terlepas dari permasalahan-permasalahan itu, JKN merupakan program yang sangat dibutuhkan terutama untuk memastikan pemenuhan hak setiap penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas serta memperbaiki status kesehatan. Perbaikan status kesehatan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan Indonesia secara umum. Oleh karena itu, kontribusi setiap pihak untuk terus

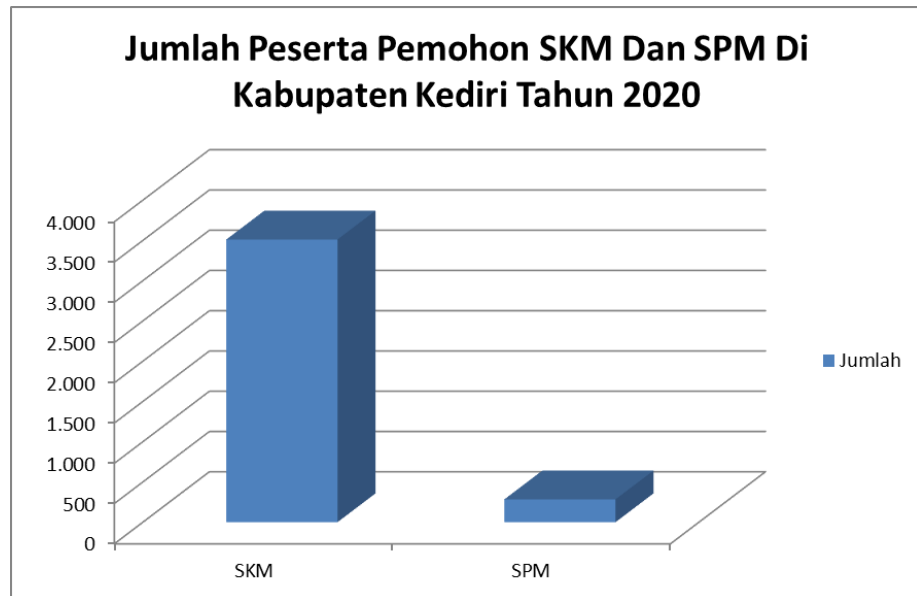
memperbaiki setiap celah dari penyelenggaraan program JKN sangat diharapkan.

2.2.3.3 Program Biakes Maskin (Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin)

Meskipun sudah banyak masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Kabupaten Kediri yang masuk kepesertaan PBI Nasional, ternyata masih ada penduduk miskin yang belum tercover oleh program JKN. Sejak tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan program unggulan yaitu Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesda merupakan bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota program JKN . Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Jamkesda adalah meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat miskin di Provinsi Jawa Timur agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengikutsertakan penduduk miskin yang belum ter-cover dalam program JKN dalam program Jamkesda. Peserta program Jamkesda terdiri dari penduduk miskin yang menggunakan SKM (Surat Keterangan Miskin) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri yang membutuhkan pelayanan di RSUD Pare Kabupaten Kediri dan saat ini yang sedang dipersiapkan RSUD SLG. Sedangkan apabila pemegang SKM membutuhkan pelayanan tingkat lanjut di luar RSUD Pare seperti di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RS Syaiful Anwar Malang RSJ Lawang Malang, maka pemegang SKM bisa memanfaatkan SPM (Surat Pernyataan Miskin) yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan di luar RSUD Pare yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Adapun jumlah peserta pemegang SKM dan SPM pada tahun 2020 seperti pada gambar grafik dibawah ini.

Gambar 2.4 Jumlah Peserta Pemohon SKM dan SPM di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2020



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kediri, 2020

Pemohon SKM ini adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam database Peserta PBI N dan PBI D. Program Jamkesda pemohon SKM ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kediri sejak tahun 2010 karena masih adanya penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak ter-cover program Jamkesmas pada waktu itu. Pada tahun 2020, ada sebanyak 3.511 jiwa penduduk miskin dan tidak mampu yang mengajukan permohonan SKM untuk mendapatkan pelayanan di RSUD Pare dan RSUD SLG dan sebanyak 283 jiwa yang mengajukan permohonan SPM untuk pelayanan kesehatan diluar RSUD Pare dan RSUD SLG yang membutuhkan pelayanan tingkat lanjut.

Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta jamkesda pemegang Kartu dan peserta Jamkesda pemegang SKM dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (Komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik. Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) kelas III dan pelayanan Gawat Darurat

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta pemegang SKM dan SPM, Pemerintah Kabupaten Kediri berencana memasukkan Peserta Pemegang SKM dan SPM serta masyarakat miskin lainnya menjadi Peserta PBI Daerah pada tahun 2021 dimana pembayaran iuran premi per bulannya akan di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga diharapkan seluruh penduduk di Kabupaten Kediri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat. Dukungan dan peran serta Pemerintah Kabupaten Kediri sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

2.2.3.4 Dana Desa Kesehatan

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/ kelurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Selain pembangunan infrastruktur di desa /kelurahan, pembangunan kesehatan masyarakat harus lebih ditingkatkan, supaya penduduk di desa/ kelurahan dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang dengan berbagai kegiatan yang bisa dicapai. Pemanfaatan dana desa untuk Kesehatan lebih banyak untuk Pengembangan UKBM yang ada di desa, seperti misalnya untuk Peningkatan Strata Posyandu, PMT bumil dan lain sebagainya yang pada prinsipnya untuk pengembangan UKBM.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa pemanfaatan dana desa / kelurahan yang menunjang kesehatan masyarakat di Kabupaten Kediri, namun belum dapat diidentifikasi dan diinventarisir secara rinci.

2.2.3.5 Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten

Alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 485.464.100.577,00 dari total APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.220.459.355.307,70. Anggaran Kesehatan per kapita di Kabupaten Kediri

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan pembangunan di Kabupaten Kediri yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, Dinas Kesehatan sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, sesuai dengan program prioritas , daerah yang ke tiga yaitu : “ Pembangunan sumber daya manusia” Program prioritas tersebut sudah selaras dengan program dari pusat dan program prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, program kerja tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, sedangkan rincian programnya adalah peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, meliputi :

- a) Kepesertaan jaminan kesehatan;
- b) Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga (kecukupan gizi, stunting, wasting, anemia bumil, ODF Open defecation free/ bebas buang air besar sembarangan)
- c) Keterjangkauan layanan kesehatan; dan
- d) Menurunnya angka kematian ibu dan bayi

Sedangkan untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan selama lima tahun atau kinerja pada masa renstra pada periode sebelumnya, maka kinerja pelayanan kesehatan dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2_3 Terlampir

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam

rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Koordinasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kediri dinilai masih perlu ditingkatkan.
- 2) Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
- 3) Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan
- 4) Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata.
- 5) Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal.
- 6) Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
- 7) Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (*new emerging* dan *re-emerging*).
- 8) Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih perlu ditingkatkan.
- 9) Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
- 10) Sarana dan prasarana SDM apotek yang belum mencukupi
- 11) Aplikasi sistem pelaporan kefarmasian yang sering mengalami perbaikan serta sosialisasi aplikasi yang belum merata
- 12) Masih kurangnya prosentase Desa Siaga Kembang yang menjadi Paripurna
- 13) Belum tercapainya target pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil
- 14) Rendahnya kehadiran Balita yang ditimbang di Posyandu
- 15) Belum tercapainya cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan
- 16) Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan masih perlu ditingkatkan
- 17) Belum optimalnya penurunan AKI dan AKB
- 18) Kebutuhan masyarakat akan air minum yang memenuhi syarat kesehatan semakin tinggi

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kabupaten Kediri 2021 – 2026 adalah *“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter-Nasionalis, Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani “*.

Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Kabupaten Kediri adalah:

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah;
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan;
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optamilisasi tata kelola lingkungan hidup, sumber daya alam, dan mitigasi bencana;

8. Pengembangan seni budaya, olah raga dan kreativitas pemuda;
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, sesuai dengan program prioritas daerah yang ke tiga yaitu :

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program prioritas tersebut sudah selaras dengan program dari pusat dan program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, program kerja tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, sedangkan rincian programnya adalah peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, meliputi :

- 1) Kepesertaan jaminan kesehatan;
- 2) Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga (kecukupan gizi, stunting, wasting, anemia bumil, ODF Open defecation free/ bebas buang air besar sembarangan)
- 3) Keterjangkauan layanan kesehatan; dan
- 4) Menurunnya angka kematian ibu dan bayi

3.3 TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai isu juga percepatan penyebaran wabah penyakit.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini membuat peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memiliki tujuan dan sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan sebagai berikut :

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan Pengendalian penyakit serta Pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan

No	Indikator	Status awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16
3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI 2019)	14%
4	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas 2018)	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas 2018)	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9 (Riskesdas 2018)	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63 (Kemkes, 2018)	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
14	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12 (Kemkes, 2019)	0
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Pembangunan di Jawa Timur menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu strategis bidang kesehatan yang dihadapi Jawa timur antara lain :

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi menurut standar MDG's
2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. Masih tingginya kasus jiwa yang terpasung
5. Belum optimalnya penanganan masalah gizi
6. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana
7. Masih rendahnya akses terhadap lingkungan sehat
8. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, material, dan keamanan ketersediaan farmasi, alkes dan makanan
9. Belum optimalnya jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan
10. Belum optimalnya pelaksanaan jaminan kesehatan
11. Belum mencukupi pembiayaan kesehatan
12. Optimalisasi manajemen kesehatan dan kebijakan pembangunan pembangunan kesehatan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tahun 2010-2030, disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruangan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Pengembangan kawasan agropolitan
2. Pengembangan pariwisata, industri dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian
3. Pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah barat dan wilayah timur
4. Pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan
7. Pengendalian fungsi kawasan lindung
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan
9. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat dan daya dukung lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra

spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Sebagai respon atas berbagai isu –isu yang berkembang maka Dinas Kesehatan sebagai implikasinya maka perlu adanya peningkatan penyediaan sarana, prasarana serta SDM bidang kesehatan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari hasil analisis terhadap hal tersebut di atas diperoleh isu- isu strategis sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dan rujukan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif
2. Pemenuhan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan
3. Optimalisasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular
4. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui
5. Pemerataan akses layanan kesehatan warga miskin
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka penurunan AKI dan AKB
7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di bidang pengawasan obat dan makanan
8. Mengembangkan lingkungan pemukiman sehat bagi masyarakat
9. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat
10. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menangani pandemi covid.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 tidak ada visi misi Dinas Kesehatan, tetapi mengikuti Visi Misi Bupati yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani”*. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Nasionalis Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisata Berbasis Kearifan Lokal
7. Optamilisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni Budaya, Olah Raga dan Kreativitas Pemuda;
9. Perwujudan Kemandirian Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun tujuan dari pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri, maka dirumuskan sasaran Dinas kesehatan Kabupaten Kediri adalah Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Dengan Indikator Sasaran Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pemerintah) yang terakreditasi Paripurna, sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja tujuan dan sasaran maka Dinas Kesehatan mempunyai target sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-n					
				Tahun Dasar (2021)	Tahun - 1 (2022)	Tahun -2 (2023)	Tahun - 3 (2024)	Tahun - 4 (2025)	Tahun - 5 (2026)
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Nilai Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	74%	76%	78%	80%
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (37 Puskesmas + 2 RSUD) yang terakreditasi Minimal Utama	59%	62%	64%	72%	80%	87%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021- 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Visi:			
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani.			
Misi 1:			
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius			
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan upaya promotif, preventif melalui	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesehatan	
			Peningkatan jaminan akses layanan Kesehatan melalui pelaksanaan program-program Kesehatan di fasilitas kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM bidang kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas SKPD berisi program program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang ada di dalam RPJMD selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2021 - 2026. Adapun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

6.1 PROGRAM KEGIATAN

6.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

Program tersebut di dukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;** dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;** dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;** dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah;** dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d) Penyediaan bahan logistik kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g) Fasilitasi kunjungan tamu
 - h) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;** dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;** dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c) Pemeliharaan mebel
 - d) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
 - e) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - f) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
7. **Peningkatan Pelayanan BLUD;** dengan sub kegiatan :

Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

6.1.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program tersebut di dukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota;** dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pembangunan puskesmas
 - b) Pengembangan puskesmas
 - c) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
 - d) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - e) Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
 - f) Pengadaan obat, vaksin
 - g) Pengadaan bahan habis pakai
 - h) Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas YANKES
 - i) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya
2. **Penyediaan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota;** dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - b) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - c) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - d) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - e) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - f) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - g) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - h) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - i) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus
 - j) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - k) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
 - l) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
 - m) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB
 - n) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat

- o) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga
 - p) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
 - q) Pengelolaan yan kes tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
 - r) Pengelolaan surveilans kesehatan
 - s) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza
 - t) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - u) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - v) Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
 - w) Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional
 - x) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat
 - y) Operasional Pelayanan Puskesmas
 - z) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - aa) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/Kota
 - bb) Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
 - cc) Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
3. **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;** dengan Sub kegiatan :
- a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - b) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4. **Penerbitan Izin Rumah Sakit Type C dan D Serta Fasilitas Yankes Tk Daerah Kab/Kota;** dengan Sub kegiatan:
- a) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
 - b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

6.1.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. **Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten / Kota;** dengan sub kegiatan :
- a) Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
 - b) Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan

2. **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota;** dengan Sub kegiatan :
 - a) Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - c) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota;** dengan sub kegiatan :

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota

6.1.4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);** dengan Sub Kegiatan
Penyediaan dan pengelolaan data perzinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
2. **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produksi Oleh Industri Rumah Tangga;** dengan Sub kegiatan :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
3. **Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Dan Minuman Industri Rumah Tangga**

Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan

6.1.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masy

2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota

Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

3. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kab/Kota

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

6.2 PENDANAAN

Pagu anggaran, indikator kinerja (terlampir)

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (37 Puskesmas + 2 RSUD) yang terakreditasi Minimal Utama	59%	62%	64%	72%	80%	87%	87%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Kediri.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkup intern Dinas Kesehatan maupun di lingkup Kabupaten Kediri.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu menjawab Visi Bupati Kediri “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju berkarakter nasionalis religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani “.

Kediri, - - 2021
Ptt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri



AHMAD KHOTIB
NIP. 19700324 200212 1 003

Bupati Kediri



H. HANIDHITO HIMAWAN PRAMANA

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-N					Realisasi Capaian Tahun Ke-N					Rasio Capaian Tahun ke-N				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Meningkatnya sumber daya yang berkualitas																			
	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas				40% (44/110)	40% (38/95)	40% (37/93)	40% (37/93)	40% (37/93)	40% (44/110)	40% (38/95)	40% (37/93)	40% (37/93)	40% (37/93)	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya pemberdayaan serta kesadaran Masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
	Rasio Posyandu per satuan Balita				1 : 70,7	1 : 70	1 : 69,2	1 : 69,2	1 : 69,2	1 : 70,7	1 : 70	1 : 69,2	1 : 69,2	1 : 69,2	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Posyandu Mandiri				9%	11%	13%	15%	17%	6%	5,70%	5,50%	4,80%	4,80%	61%	52%	42%	32%	28%
	persentase Posyandu Purnama - Mandiri				90%	95%	100%	100%	100%	87,60%	86,88%	88,41%	92,20%	86,50%	97%	91%	8841%	92%	87%
	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama - Mandiri				20%	25%	30%	35%	40%	42%	38%	39%	39%	35%	210%	152%	130%	111%	88%
	Persentase Rumah Sehat				72%	80%	85%	90%	93%	66,64%	71,80%	78,74%	-	-	93%	90%	93%	-	-
	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak terhadap air minum yang layak				70%	75%	85%	90%	100%	78,30%	73,10%	83,26%	78,20%	70,30%	112%	97%	98%	87%	70%
	Persentase Tempat -Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat				35%	45%	60%	80%	100%	84,61%	87,77%	82,50%	61,10%	52%	242%	195%	138%	76%	52%
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat				10%	20%	30%	50%	80%	57,69%	63,14%	68,73%	13,10%	41,50%	577%	316%	229%	26%	52%
	Persentase penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban sehat)				90%	95%	97%	100%	100%	72,66%	82,44%	89,60%	89%	93,60%	81%	87%	92%	89%	94%
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu, neonatus, bayi, balita dan KB																			
	Angka kematian ibu				65,36	61,87	58,30	58,30	41,64	65,74	61,28	60,4	60,4	85,3	101%	99%	104%	104%	205%
	Angka kematian bayi				7,68	7,42	7,29	7,08	6,87	6,86	6,33	6,78	6,8	7,3	89%	85%	93%	96%	106%
	Angka usia harapan hidup				72,23	72,32	72,41	72,5	72,59	72,2	72,25	72,37	72,54	72,61	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4				93	94	95	96	97	92,21	92,89	91,54	91,5	88	99%	99%	96%	95%	91%
	Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				80	80	80	80	80	95,97	91,82	88,38	90	84,3	120%	115%	110%	113%	105%
	Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				95	96	97	98	99	95,97	94,51	92,39	91,6	90,5	101%	98%	95%	93%	91%
	Persentase cakupan kunjungan nifas				92	93	94	95	96	91,60	92,43	90,34	90,5	89,2	100%	99%	96%	95%	93%
	Persentase cakupan kunjungan Bayi Paripurna				97	98	99	100	100	96,08	96,52	93,7	97,7	93,3	99%	98%	95%	98%	93%
	Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani				77	78	79	80	80	76,21	75,38	65,97	66,8	55,1	99%	97%	84%	84%	69%
	Persentase cakupan kunjungan Anak Balita Paripurna				82	84	86	88	88	82,39	82,41	89,96	91,5	75,5	100%	98%	105%	104%	86%
	Persentase cakupan peserta KB aktif				65	65	65	65	70	75,42	74,70	75,87	71,8	71,1	116%	115%	117%	110%	102%
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan				90	91	92	93	94	90,40	91,87	90,17	89,1	83,4	100%	101%	98%	96%	89%
	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase balita yang ditimbang berat badannya				70	71	72	73	74	73,38	73,68	74,59	71,3	31,5	105%	104%	104%	98%	43%
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan (0-6 bulan) mendapat ASI Eksklusif				65	66	67	68	69	76,65	75,81	73,93	78,1	78,9	118%	115%	110%	115%	114%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada kelompok anak usia sekolah, remaja dan lansia																			
	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat				100	100	100	100	100	100	99,34	99,91	93,1	96,8	100%	99%	100%	93%	97%
	Persentase cakupan pelayanan kesehatan lansia				66	67	68	69	70	66,36	69,71	77,32	49,9	22,7	101%	104%	114%	72%	32%
5. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular																			
	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				90	90,5	91	91,5	92	97,97	99,42	97,38	93,02	66,9	109%	110%	107%	102%	73%
	Persentase KLB ditanggulangi < 24 jam				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kasus DBD ditangani sesuai standar				100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah pengidap HIV yang mengakses layanan CST				65	70	75	80	80	79	85	96,4	88,28	89	122%	121%	100%	110%	111%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA (+)				50	55	60	65	70	53,51	58,94	53,91	68,07	39,3	107%	107%	100%	105%	56%
	Persentase kasus baru BTA (+) yang sembuh diantara kasus baru BTA (+) yang diobati				0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	88,60	40,32	86,18	40,7	92,2	10424%	4744%	10139%	4788%	10847%

Tabel 2.3 a

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-N					Realisasi Capaian Tahun Ke-N					Rasio Capaian Tahun ke-N					
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Persentase kasus cacat Tk II diantara kasus kusta ditemukan dlm periode satu tahun				10	10	5	5	5	4,55	14,29	23,33	15,2	16,7	45%	143%	467%	304%	334%	
	Persentase penemuan penderita kusta usia < 14 th diantara kasus kusta ditemu kan dlm periode satu tahun				10	10	5	5	5	2,27	4,76	33,3	0	11,1	23%	48%	666%	0%	222%	
	Persentase Cakupan penemuan & penanganan kasus pneumonia balita dlm waktu satu tahun				60	60	65	65	0,65	69,88	68,23	58,45	70,1	35	116%	114%	90%	108%	5385%	
	Persentase Cakupan penemuan & penanganan kasus diare dlm waktu satu tahun				85	85	90	90	90	68,2	71,58	65,5	59,9	31,1	80%	84%	73%	67%	35%	
	Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan sesuai standar				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase bebas pasung pada ODGJ berat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan																				
	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta jaminan kesehatan nasional				30%	30%	30%	30%	30%	52%	43%	62%	65,90%	75%	173%	143%	207%	220%	249%	
	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI)				610.353	615.500	615.500	616.000	238.789	593.850	587.058	659.221	682.426	23.467	97%	95%	107%	111%	10%	
	Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JKN/ Jamkesda				30%	30%	30%	30%	30%	52%	43%	62%	65,90%	75%	173%	143%	207%	220%	249%	
7. Meningkatnya pelayanan kefarmasian disarana kefarmasian dan alkes																				
	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang dibina (apotik, IFK, Toko Obat, Puskesmas)				153	157	161	165	171	150	157	161	165	171	98%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase jumlah pelaku usaha yang dibina				11.65% (145/1244)	11.65% (145/1244)	11.65% (145/1244)	11.65% (145/1244)	11.65% (145/1244)	11,65	11,65	11,65%	11,65%	11,65%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase obat dan perbekalan kesehatan dengan tingkat aman				75%	78%	80%	80%	80%	58%	70%	58%	68%	57,64%	77%	90%	73%	85%	72%	
8. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan																				
	Persentase Puskesmas Terakreditasi				59% (22 dari 37 puskesmas)	81% (30 dari 37 puskesmas)	100% (37 dari 37 puskesmas)	100% (37 dari 37 puskesmas)	100% (37 dari 37 puskesmas)	59%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio TT rumah sakit per satuan penduduk				1:1921	1:1732	1:1734	1:1533	1:1533	1:1921	1:1820	1:1820	1:1450	1:1339	100%	105%	105%	95%	88%	
	% Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar				18% (2 dari 11 RS)	25% (3 dari 12 RS)	25% (3 dari 12 RS)	25% (3 dari 12 RS)	25% (3 dari 12 RS)	18%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
9. Meningkatnya kualitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan																				
	Persentase tersedianya sistem informasi dan data kesehatan di puskesmas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 2.3.1
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N			REALISASI TAHUN KE-N			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -n			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	ANGGARAN	REALIASASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.566.848.241,00	3.530.740.769,00	13.491.596.041,00	2.417.258.206,90	1.822.324.903,00	8.835.748.697,00	94,17	51,61	65,49		
- Penyediaan jasa surat menyurat	5.030.000,00	4.700.000,00	5.200.000,00	4.091.028,00	4.022.950,00	2.974.689,00	81,33	85,59	57,21		
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	703.987.541,00	1.751.100.000,00	2.156.000.000,00	696.148.756,00	227.447.735,00	1.037.070.966,00	98,89	12,99	48,10		
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.500.000,00	13.500.000,00	209.400.000,00	12.026.700,00	13.449.100,00	92.599.703,00	89,09	99,62	44,22		
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.250.000,00	312.565.000,00	303.772.632,00	85.050.000,00	299.485.625,00	284.024.157,00	99,77	95,82	93,50		
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	164.033.725,00	1.210.458.000,00	0	159.832.547,00	456.394.506,00		97,44	37,70		
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0	121.045.299,00	120.250.000,00	0	121.012.750,00	96.280.925,00		99,97	80,07		
- Penyediaan alat tulis kantor	63.015.000,00	60.951.400,00	369.800.700,00	58.032.500,00	57.740.500,00	330.872.400,00	92,09	94,73	89,47		
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.540.000,00	53.045.000,00	55.295.000,00	41.440.000,00	52.875.000,00	55.294.250,00	99,76	99,68	100,00		
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.500.000,00	15.000.000,00	168.600.000,00	13.500.000,00	14.971.700,00	9.791.833,00	100,00	99,81	5,81		
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	656.196.200,00	257.340.700,00	3.373.503.955,00	572.582.340,90	248.053.750,00	2.129.223.662,00	87,26	96,39	63,12		
- Penyediaan peralatan rumah tangga	11.100.000,00	14.000.000,00	769.180.000,00	11.100.000,00	13.977.000,00	581.738.400,00	100,00	99,84	75,63		
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.550.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.550.000,00	5.850.000,00	5.730.000,00	100,00	100,00	97,95		
- Penyediaan makanan dan minuman	81.500.000,00	26.250.000,00	165.000.000,00	65.170.000,00	10.781.250,00	49.490.000,00	79,96	41,07	29,99		
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.000.000,00	157.200.000,00	455.142.074,00	166.534.892,00	157.198.159,00	292.574.021,00	97,96	100,00	64,28		
- Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	13.870.000,00	46.368.000,00	620.456.000,00	12.047.500,00	41.145.000,00	460.741.000,00	86,86	88,74	74,26		
- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam Daerah	54.500.000,00	119.310.000,00	110.710.000,00	50.029.500,00	104.629.450,00	78.775.000,00	91,80	87,70	71,15		
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	41.621.800,00	59.420.110,00	153.036.000,00	40.122.765,00	55.852.599,00	129.156.125,00	96,40	94,00	84,40		
- Penyediaan Jasa Administrasi Barang	108.544.000,00	156.338.000,00	158.738.000,00	105.442.500,00	150.054.500,00	137.445.000,00	97,14	95,98	86,59		
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	76.500.000,00	192.723.535,00	379.232.680,00	75.244.750,00	83.945.288,00	291.480.296,00	98,36	43,56	76,86		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.356.593.000,00	4.346.001.790,00	4.206.543.095,50	1.180.713.724,00	3.718.093.005,00	3.297.845.352,00	87,04	85,55	78,40		
- Pembangunan gedung kantor	46.350.000,00	30.983.500,00	1.800.000.000,00	45.684.000,00	30.653.500,00	1.667.601.100,00	98,56	98,93	92,64		
- pengadaan Kendaraan dinas/operasional	64.000.000,00		446.706.759,50	63.725.000,00		412.960.000,00	99,57		92,45		
- Pengadaan Tanah	0			0	3.051.513.306,00	63.340.000,00		84,88	97,45		
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	184.570.000,00	3.595.000.000,00	65.000.000,00	181.282.574,00	138.250.000,00	676.278.700,00	98,22	66,06	372,65		
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.500.000,00	209.268.290,00	181.480.336,00	38.789.500,00	199.976.399,00	167.616.752,00	98,20	95,56	92,36		
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70.550.000,00	38.500.000,00	18.500.000,00	58.621.900,00	38.344.800,00	15.043.200,00	83,09	99,60	81,31		
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	88.250.000,00	81.750.000,00	0	79.023.500,00	49.680.300,00	#DIV/0!	89,55	60,77		

TABEL 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N			REALISASI TAHUN KE-N			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -n			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	ANGGARAN	REALIASASI
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	707.500.000,00	33.000.000,00	114.950.000,00	590.099.750,00	31.422.500,00	105.770.300,00	83,41	95,22	92,01		
- Pensertifikatan tanah milik daerah	32.373.000,00		10.000.000,00	3.875.000,00		10.000.000,00	11,97		100,00		
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Alat Medis	211.750.000,00	211.750.000,00	177.656.000,00	198.636.000,00	148.909.000,00	129.555.000,00	93,81	70,32	72,92		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.304.355.400,00	728.262.900,00	1.271.146.900,00	821.522.709,00	688.008.955,00	556.689.775,00	62,98	94,47	43,79		
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	424.320.000,00	98.252.400,00	148.319.500,00	134.821.309,00	91.080.955,00	104.250.000,00	31,77	92,70	70,29		
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4.374.400,00		122.951.900,00	4.374.400,00		54.382.275,00	100,00		44,23		
- Pendidikan dan pelatihan penunjang tupoksi	0		726.875.000,00	0		282.091.000,00	0,00		38,81		
- Akreditasi tenaga fungsional	28.578.500,00	27.540.500,00	33.000.500,00	28.578.500,00	27.540.500,00	31.793.500,00	100,00	100,00	96,34		
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan	847.082.500,00	602.470.000,00	240.000.000,00	653.748.500,00	569.387.500,00	84.173.000,00	77,18	94,51	35,07		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	212.316.000,00	272.142.645,00	379.689.500,00	116.627.000,00	241.045.195,00	266.368.850,00	54,93	88,57	70,15		
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	4.672.000,00	4.962.000,00	1.535.000,00	2.752.000,00	4.953.000,00	1.535.000,00	58,90	99,82	100,00		
- Penyusunan Lapid	7.533.500,00	7.785.000,00	2.145.000,00	6.273.500,00	7.773.000,00	2.145.000,00	83,27	99,85	100,00		
- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5.621.500,00	5.833.000,00	1.245.000,00	0	5.821.000,00	1.240.800,00	0,00	99,79	99,66		
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	39.898.000,00	61.990.000,00	49.280.000,00	24.434.000,00	37.419.150,00	35.966.850,00	61,24	60,36	72,98		
- Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ Perangkat Daerah	16.600.000,00	15.383.000,00		0	13.629.900,00		0,00	88,60			
- Pengembangan sistem dan Layanan Informasi Terpadu	137.991.000,00	176.189.645,00	325.484.500,00	83.167.500,00	171.449.145,00	225.481.200,00	60,27	97,31	69,28		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.409.269.165,00	6.490.528.159,00	6.475.651.350,00	2.834.689.612,00	4.517.083.300,00	5.588.067.580,00	30,13	69,60	86,29		
- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.387.425.165,00	6.407.995.159,00	6.426.356.050,00	2.817.612.512,00	4.446.105.300,00	5.539.447.280,00	30,01	69,38	86,20		
- Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	21.844.000,00	82.533.000,00	49.295.300,00	17.077.100,00	70.978.000,00	48.620.300,00	78,18	86,00	98,63		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	41.870.500,00	37.220.250,00	40.000.000,00	28.980.000,00	34.621.250,00	38.285.000,00	69,21	93,02	95,71		
- Pengembangan Kesehatan remaja	41.870.500,00	37.220.250,00	40.000.000,00	28.980.000,00	34.621.250,00	38.285.000,00	69,21	93,02	95,71		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		48.000.000,00	50.000.000,00		47.500.000,00	0	#DIV/0!	98,96	0,00		
- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal		48.000.000,00	50.000.000,00		47.500.000,00	0	#DIV/0!	98,96	0,00		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.263.142.330,00	21.037.546.799,98	28.038.161.500,00	12.448.142.913,00	17.937.379.861,00	22.020.845.979,00	81,56	85,26	78,54		
- Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	39.660.000,00	13.030.000,00	30.000.000,00	0	13.030.000,00	26.775.000,00	0,00	100,00	89,25		
- Revitalisasi sistem kesehatan	55.950.250,00	58.574.500,00	30.620.000,00	20.520.750,00	50.795.500,00	21.297.100,00	36,68	86,72	69,55		
- Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	57.723.000,00	72.230.000,00	5.637.000,00	49.625.000,00	70.930.000,00	0	85,97	98,20	0,00		
- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan khusus		168.737.500,00	280.500.000,00		167.266.500,00	269.652.000,00	#DIV/0!	99,13	96,13		
- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	108.700.000,00	105.400.000,00	141.250.000,00	94.380.000,00	88.675.575,00	123.878.751,00	86,83	84,13	87,70		
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	39.370.000,00	287.651.200,00	99.276.600,00	35.360.000,00	217.345.700,00	31.721.400,00	89,81	75,56	31,95		

TABEL 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N			REALISASI TAHUN KE-N			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -n			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	ANGGARAN	REALIASASI
- Penyediaan biaya pelayanan kesehatan tingkat puskesmas	1.155.471.580,00	1.166.057.999,98	645.790.000,00	1.077.758.180,00	1.073.564.670,00	613.682.433,00	93,27	92,07	95,03		
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	54.929.500,00	103.630.100,00	58.400.000,00	22.433.500,00	101.885.100,00	47.559.000,00	40,84	98,32	81,44		
- Pembinaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	23.322.000,00	38.292.500,00	24.455.000,00	21.785.000,00	37.317.500,00	22.305.000,00	93,41	97,45	91,21		
- Bantuan Operasional Kesehatan	11.100.555.000,00	16.023.279.000,00	22.122.744.000,00	9.838.936.383,00	13.962.653.466,00	18.054.672.515,00	88,63	87,14	81,61		
- Jaminan Persalinan	2.620.750.000,00	3.000.664.000,00	4.599.488.900,00	1.287.344.100,00	2.153.915.850,00	2.809.302.780,00	49,12	71,78	61,08		
Program Pengawasan Obat dan Makanan	134.766.000,00	15.360.000,00	89.749.700,00	85.215.000,00	12.360.000,00	50.649.700,00	63,23	80,47	56,43		
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	123.667.000,00	15.360.000,00	76.692.000,00	85.215.000,00	12.360.000,00	37.922.000,00	68,91	80,47	49,45		
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	11.099.000,00		13.057.700,00	0		12.727.700,00	0,00		97,47		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	906.643.000,00	864.240.000,00	1.797.316.500,00	814.438.000,00	837.010.000,00	1.618.603.000,00	89,83	96,85	90,06		
- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	96.752.000,00	134.104.000,00	967.830.000,00	96.752.000,00	109.104.000,00	796.474.500,00	100,00	81,36	82,29		
- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	153.748.000,00	96.966.000,00	140.000.000,00	109.678.000,00	96.966.000,00	139.340.000,00	71,34	100,00	99,53		
- Peningkatan kerjasama pengembangan POSYANDU	0	633.170.000,00	689.486.500,00	0	630.940.000,00	682.788.500,00	#DIV/0!	99,65	99,03		
- Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	364.850.000,00	364.850.000,00	9.850.000,00	318.737.250,00	334.313.000,00	9.850.000,00	87,36	91,63	100,00		
- Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	355.000.000,00	355.000.000,00	364.000.000,00	308.887.250,00	324.463.000,00	324.517.178,00	87,01	91,40	89,15		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	136.720.250,00	127.832.250,00	690.000.000,00	132.504.750,00	126.027.250,00	522.435.174,00	96,92	98,59	75,72		
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	63.073.000,00	86.186.250,00	660.000.000,00	63.073.000,00	85.086.250,00	493.957.674,00	100,00	98,72	74,84		
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	53.995.250,00	5.610.000,00	11.000.000,00	52.655.250,00	5.385.000,00	10.090.000,00	97,52	95,99	91,73		
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19.652.000,00	36.036.000,00	19.000.000,00	16.776.500,00	35.556.000,00	18.387.500,00	85,37	98,67	96,78		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	386.425.374,00	493.388.800,00	1.641.000.000,00	370.498.674,00	473.085.800,00	1.478.124.350,00	95,88	95,88	90,07		
- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	84.729.000,00	48.545.000,00	75.000.000,00	78.725.000,00	48.330.000,00	63.248.350,00	92,91	99,56	84,33		
- Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	25.040.250,00	41.755.800,00	40.000.000,00	24.120.250,00	32.071.800,00	33.120.000,00	96,33	76,81	82,80		
- Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	11.966.000,00	11.690.000,00	10.000.000,00	9.011.000,00	11.090.000,00	9.405.000,00	75,31	94,87	94,05		
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.622.424,00	22.597.000,00	20.000.000,00	11.462.424,00	22.273.000,00	17.495.000,00	98,62	98,57	87,48		
- Pelaksanaan Kabupaten Sehat	253.067.700,00	368.801.000,00	250.000.000,00	247.180.000,00	359.321.000,00	241.105.000,00	97,67	97,43	96,44		
- Pengadaan IPAL dan SPAL			1.246.000.000,00			1.113.751.000,00	#DIV/0!		89,39		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.360.754.000,00	2.210.259.500,00	1.531.043.500,00	2.132.217.450,00	2.108.642.143,00	1.440.606.515,00	90,32	95,40	94,09		
- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.340.409.000,00	1.232.522.250,00	764.823.500,00	1.191.851.550,00	1.174.529.143,00	746.091.715,00	88,92	95,29	97,55		
- Peningkatan imunisasi	214.295.000,00	246.830.000,00	71.545.000,00	199.778.900,00	237.750.000,00	68.735.000,00	93,23	96,32	96,07		

TABEL 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N			REALISASI TAHUN KE-N			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -n			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	ANGGARAN	REALIASASI
- Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	67.705.000,00	75.295.000,00	67.765.000,00	64.750.000,00	70.905.000,00	62.545.000,00	95,64	94,17	92,30		
- Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	123.041.000,00	181.249.000,00	141.793.000,00	117.911.000,00	169.390.500,00	127.076.600,00	95,83	93,46	89,62		
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	121.000.000,00	101.430.000,00	106.188.000,00	87.922.000,00	95.870.000,00	85.514.000,00	72,66	94,52	80,53		
- Penanggulangan HIV / AIDS	204.348.000,00	199.118.250,00	200.048.000,00	181.148.000,00	196.882.500,00	191.136.400,00	88,65	98,88	95,55		
- Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang	289.956.000,00	173.815.000,00	178.881.000,00	288.856.000,00	163.315.000,00	159.507.800,00	99,62	93,96	89,17		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.479.735.500,00	1.211.113.000,00	2.215.519.200,00	1.136.695.726,00	846.393.924,00	1.875.586.690,00	76,82	69,89	84,66		
- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	29.433.000,00	13.533.000,00	227.697.500,00	22.968.000,00	13.338.000,00	77.050.575,00	78,03	98,56	33,84		
- Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan		18.615.000,00			13.830.000,00		#DIV/0!	74,29	#DIV/0!		
- Akreditasi pelayanan kesehatan	1.450.302.500,00	1.178.965.000,00	1.987.821.700,00	1.113.727.726,00	819.225.924,00	1.798.536.115,00	76,79	69,49	90,48		
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	3.660.703.563,00	1.519.527.705,10	367.563.908,80	2.309.171.857,90	1.299.156.795,80	277.536.564,00	63,08	85,50	75,51		
- Manajemen dan koordinasi pelayanan masyarakat miskin	194.600.000,00	194.600.000,00	161.173.000,00	167.996.000,00	180.620.000,00	138.857.000,00	86,33	92,82	86,15		
- Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskim (Iamsosda)	3.466.103.563,00	1.324.927.705,10	206.390.908,80	2.141.175.857,90	1.118.536.796	138.679.564,00	61,77	84,42	67,19		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	14.639.487.224,00	24.607.105.793,02	5.116.942.296,00	12.972.181.072,00	15.803.417.234,00	2.416.375.400,00	88,61	64,22	47,22		
- Pengadaan puskesmas keliling	3.104.500.000,00			2.954.250.000,00			95,16				
- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.257.458.980,00	8.904.215.000,02	4.000.842.296,00	807.490.872,00	735.193.684,00	1.616.585.900,00	64,22	8,26	40,41		
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	4.000.000,00	185.600.000,00	na	3.600.000,00	22.343.300,00	na	90,00	12,04			
- Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	2.726.000.000,00	2.449.690.793,00	110.000.000,00	2.612.234.000,00	2.290.150.350,00	103.295.000,00	95,83	93,49	93,90		
- Rehabilitasi sedan/berat puskesmas	7.524.178.244,00	13.008.000.000,00	660.000.000,00	6.586.646.200,00	12.706.861.900,00	387.622.000,00	87,54	97,68	58,73		
- Pengelolaan aset bangunan kesehatan	23.350.000,00	59.600.000,00	97.600.000,00	7.960.000,00	48.868.000,00	87.015.000,00	34,09	81,99	89,15		
- Rehab rumah dinas medis dan paramedis	0		248.500.000,00	0		221.857.500,00	#DIV/0!		89,28		
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	150.000.000,00	33.601.018.417,23	66.482.831.611,97	139.808.000,00	18.918.706.858,73	60.838.955.891,02	93,21	56,30	91,51		
- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	50.000.000,00	7.830.537.793,00	11.168.381.408,00	45.342.000,00	6.793.168.994,00	11.063.665.761,66	90,68	86,75	99,06		
- Pengadaan obat-obatan rumah sakit	50.000.000,00	1.153.000.000,00	2.089.000.000,00	46.676.500,00	315.112.000,00	1.450.192.061,00	93,35	27,33	69,42		
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	50.000.000,00			47.789.500,00			95,58				
- Pengadaan ambulance/mobil jenazah			1.191.000.000,00			1.162.478.250,00	#DIV/0!		97,61		
- Pengadaan mebeuleur rumah sakit			5.015.564.596,00			4.019.350.210,00	#DIV/0!		80,14		
- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)			1.931.100.000,00			1.603.751.402,00	#DIV/0!		83,05		
- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit			1.001.500.000,00			673.093.846,00	#DIV/0!		67,21		

TABEL 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N			REALISASI TAHUN KE-N			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -n			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	ANGGARAN	REALIASASI
- Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit			295.250.000,00			163.998.225,00	#DIV/0!		55,55		
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan			103.500.000,00			8.200.000,00	#DIV/0!		7,92		
- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit		24.617.480.624,20	43.687.535.607,97		11.810.425.864,73	40.694.226.135,36	#DIV/0!	47,98	93,15		
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	24.695.250,00	19.579.250,00	24.000.000,00	24.695.250,00	18.809.250,00	20.915.000,00	100,00	96,07	87,15		
- Pelayanan pemeliharaan kesehatan	24.695.250,00	19.579.250,00	24.000.000,00	24.695.250,00	18.809.250,00	20.915.000,00	100,00	96,07	87,15		
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	17.650.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	3.505.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	19,86	100,00	100,00		
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	17.650.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	3.505.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	19,86	100,00	100,00		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan bayi	333.138.500,00	304.618.500,00	314.400.000,00	296.687.500,00	300.764.250,00	285.584.000,00	89,06	98,73	90,83		
- Peningkatan dan pengembangan kesehatan ibu, bayi, balita dan reproduksi	333.138.500,00	304.618.500,00	314.400.000,00	296.687.500,00	300.764.250,00	285.584.000,00	89,06	98,73	90,83		
Program peningkatan dan pengembangan pendidikan bidang kesehatan	26.055.000,00	24.815.000,00	26.055.000,00	26.055.000,00	24.815.000,00	3.875.000,00	100,00	100,00	14,87		
- Pemilihan calon tenaga kesehatan teladan	26.055.000,00	24.815.000,00	26.055.000,00	26.055.000,00	24.815.000,00	3.875.000,00	100,00	100,00	14,87		
Program kesehatan Anak Usia Sekolah (AUS)	59.385.000,00	47.249.500,00	55.000.000,00	54.711.500,00	35.333.500,00	35.665.000,00	92,13	74,78	64,85		
- Pengembangan UKS	37.885.500,00	27.820.000,00	35.000.000,00	37.885.500,00	19.504.000,00	23.748.000,00	100,00	70,11	67,85		
- Pengembangan program kesehatan anak usia sekolah berkelainan (SLB, Panti Asuhan)	21.499.500,00	19.429.500,00	20.000.000,00	16.826.000,00	15.829.500,00	11.917.000,00	78,26	81,47	59,59		
Program pengadaan, peningkatan dan pengembangan uji laboratorium kesehatan	893.677.000,00	968.514.690,00	960.441.000,00	883.398.500,00	947.549.110,00	831.109.632,00	98,85	97,84	86,53		
- Pengadaan sarana dan prasarana uji laboratorium kesehatan	30.410.000,00	71.560.000,00	44.704.000,00	30.110.000,00	70.620.000,00	32.418.000,00	99,01	98,69	72,52		
- Pengadaan media uji laboratorium kesehatan	54.330.000,00	62.865.250,00	127.788.368,00	54.020.000,00	61.571.250,00	127.320.000,00	99,43	97,94	99,63		
- Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan uji laboratorium kesehatan	132.247.000,00	126.554.440,00	134.013.632,00	126.117.000,00	116.997.460,00	131.683.632,00	95,36	92,45	98,26		
- Pengadaan media uji laboratorium kesehatan donor darah	676.690.000,00	707.535.000,00	653.935.000,00	673.151.500,00	698.360.400,00	539.688.000,00	99,48	98,70	82,53		
Program Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	103.045.180,00	112.797.000,00	115.736.000,00	85.002.680,00	94.057.000,00	110.039.025,00	82,49	83,39	95,08		
- Pemecuan STBM	10.782.500,00	15.933.000,00	10.000.000,00	10.782.500,00	13.333.000,00	8.581.200,00	100,00	83,68	85,81		
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	35.261.680,00	42.773.000,00	35.000.000,00	34.461.680,00	41.573.000,00	32.939.900,00	97,73	97,19	94,11		
- Sosialisasi SIBM	12.018.000,00		12.000.000,00	12.018.000,00		12.000.000,00	100,00		100,00		
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	44.983.000,00	54.091.000,00	58.736.000,00	27.740.500,00	39.151.000,00	56.517.925,00	61,67	72,38	96,22		
Program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman	165.450.000,00			165.315.000,00			99,92				
- Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA)	165.450.000,00			165.315.000,00			99,92				
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD	58.715.200,00	175.252.880.512,38	189.991.427.236,32	53.251.125,00	125.258.688.526,71	142.519.183.756,05	90,69	71,47	75,01		
- Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan	58.715.200,00	175.252.880.512,38	189.991.427.236,32	53.251.125,00	125.258.688.526,71	142.519.183.756,05	90,69	71,47	75,01		

TABEL 2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N			REALISASI TAHUN KE-N			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -n			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	ANGGARAN	REALIASASI
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	24.095.428.998,74		21.195.236.000,00	18.562.895.850,00		20.025.382.985,00	77,04		94,48		
- Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	19.595.428.998,74		20.795.236.000,00	18.562.895.850,00		19.628.223.060,00	94,73		94,39		
- Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	4.500.000.000,00		400.000.000,00			397.159.925,00	0,00		99,29		
Total	158.094.567.650,74	283.547.943.059,53	351.241.755.539,59	131.139.391.851,80	167.697.849.488,74	239.361.957.581,74	82,95	59,14	68,15		

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N		REALISASI TAHUN KE-N		REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	4 (2019)	5 (2020)	4 (2019)	5 (2020)	4 (2019)	5 (2020)	ANGGARAN	REALIASASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.918.654.378,00	18.283.308.632,00	2.395.238.315,00	17.178.504.346,00	82,07	93,96		
- Pelaksanaan administrasi perkantoran	2.586.674.378,00	17.783.865.242,00	2.115.769.500,00	16.869.231.365,00	81,79	94,86		
- Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	331.980.000,00	499.443.390,00	279.468.815,00	309.272.981,00	84,18	61,92		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.201.465.904,09	2.700.995.200,00	2.547.102.564,00	2.175.571.011,00	79,56	80,55		
- Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	3.201.465.904,09	2.700.995.200,00	2.547.102.564,00	2.175.571.011,00	79,56	80,55		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	512.996.000,00	525.528.000,00	356.498.666,00	204.306.600,00	69,49	38,88		
- Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	512.996.000,00	525.528.000,00	356.498.666,00	204.306.600,00	69,49	38,88		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	177.278.000,00	133.551.000,00	156.374.000,00	110.805.000,00	88,21	82,97		
- Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	177.278.000,00	133.551.000,00	156.374.000,00	110.805.000,00	88,21	82,97		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	34.020.758.600,00	45.792.476.000,00	29.684.331.356,00	32.035.052.246,71	87,25	69,96		
- Kesehatan Keluarga dan Gizi	570.650.000,00	1.227.170.000,00	515.282.000,00	618.964.118,00	90,30	50,44		
- Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	911.943.600,00	1.123.769.000,00	815.439.600,00	502.783.000,00	89,42	44,74		
- Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerjadan Olahraga	706.576.000,00	194.346.000,00	446.773.800,00	153.802.500,00	63,23	79,14		
- Bantuan Operasional Puskesmas	29.168.589.000,00	38.220.178.000,00	25.315.685.406,00	26.652.634.133,59	86,79	69,73		
- Jaminan Persalinan	2.663.000.000,00	5.027.013.000,00	2.591.150.550,00	4.106.868.495,12	97,30	81,70		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.234.471.150,00	3.853.997.850,00	4.900.437.221,00	2.911.594.414,00	93,62	75,55		
- Peningkatan Pelayanan, Pemenuhan, Pembinaan Pengawasan di Bidang Kefarmasian, Pangan, NAPZA, PKRT	5.135.331.150,00	3.823.127.850,00	4.809.264.221,00	2.895.196.414,00	93,65	75,73		
- Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	99.140.000,00	30.870.000,00	91.173.000,00	16.398.000,00	91,96	53,12		
Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	528.850.000,00		489.257.350,00		92,51	0,00		
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	528.850.000,00		489.257.350,00		92,51	0,00		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	963.751.845,00	677.929.412,00	852.736.975,00	504.222.483,00	88,48	74,38		
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	637.091.785,00	435.361.400,00	535.954.585,00	331.045.471,00	84,13	76,04		
- Peningkatan Imunisasi dan Surveilans	125.989.060,00	96.338.012,00	120.630.390,00	83.452.012,00	95,75	86,62		
- Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dan Keswa	200.671.000,00	146.230.000,00	196.152.000,00	89.725.000,00	97,75	61,36		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.441.482.480,00	2.237.804.000,00	1.298.183.638,00	1.190.646.340,00	90,06	53,21		
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	60.940.300,00	80.882.000,00	56.758.750,00	43.566.000,00	93,14	53,86		
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	1.350.459.180,00	2.134.217.000,00	1.218.126.888,00	1.126.298.340,00	90,20	52,77		
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	30.083.000,00	22.705.000,00	23.298.000,00	20.782.000,00	77,45	91,53		

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-N		REALISASI TAHUN KE-N		REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	4 (2019)	5 (2020)	4 (2019)	5 (2020)	4 (2019)	5 (2020)	ANGGARAN	REALIASASI
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	184.888.146,00	86.058.000,00	151.219.501,00	41.719.000,00	81,79	48,48		
- Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskim (Jamsosda)	67.700.146,00	0	66.388.001,00	0	98,06	0,00		
- Manajemen dan koordinasi pelayanan masyarakatmiskim	117.188.000,00	86.058.000	151.219.501	41.719.000	129,04	48,48		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	14.251.822.855,00	10.682.092.813,44	13.070.252.298,00	9.359.234.577,00	91,71	87,62		
- Peningkatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	4.709.422.955,00	2.051.903.229,63	4.261.360.500,00	1.876.202.080,00	90,49	91,44		
- Peningkatan, Pelayanan Penyediaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Prasarana	9.542.399.900,00	8.630.189.583,81	8.808.891.798,00	7.483.032.497,00	92,31	86,71		
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		28.988.351.260,00		23.419.597.661,87	0,00	80,79		
- Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit		1.800.000.000,00		1.030.731.243,58	0,00	57,26		
- Pengadaan obat-obatan rumah sakit		5.137.119.933,00		5.050.797.952,76	0,00	98,32		
- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit		10.231.610.000,00		8.982.408.491,00	0,00	87,79		
- Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur		7.854.312.827,00		6.315.052.998,90	0,00	80,40		
Program pengadaan, peningkatan dan pengembangan uji laboratorium kesehatan	1.137.211.000,00	1.174.949.000,00	1.080.920.700,00	1.107.697.280,00	95,05	94,28		
- Pengadaan dan Peningkatan Pelayanan Uji Laboratorium (UPTD LABKES)	1.137.211.000,00	1.174.949.000,00	1.080.920.700,00	1.107.697.280,00	95,05	94,28		
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD		246.738.330.242,72		173.180.064.622,58	0,00	70,19		
- Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan		1.847.445.606,89		1.634.334.396,00		88,46		
- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD		244.890.884.635,83		171.545.730.226,58		70,05		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	26.143.676.198,00	26.849.211.000,00	25.160.204.050,00	22.635.742.506,12	96,24	84,31		
- Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	23.265.393.198,00	26.749.211.000,00	22.372.723.550,00	22.569.652.506,12	96,16	84,38		
- Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	2.267.108.000,00	0	2.230.555.500,00	0	98,39	0,00		
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventif Maupun Kuratif Rehabilitatif		100.000.000,00		66.090.000,00		66,09		
- Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga administrasi pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	611.175.000,00	0	556.925.000,00	0	91,12	0,00		
Total	176.890.227.756,09	355.101.131.087,40	157.676.666.941,00	191.248.286.149,57	89,14	53,86		

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1		2		4	5
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1		2		4	5
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun
				Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM
					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi
					Indeks Keluarga Sehat
					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi
					Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin
					AKI
					AKB
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
				Pembangunan puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya
				Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas
					Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas
					Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas
					Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi
				Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman
					Jumlah item pengadaan obat , vaksin
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik
				Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1		2		4	5
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)
					Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna
					Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina
					Persentase penyehat tradisional yang dibina
					Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA
					Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad
					Persentase akses sanitasi layak
					Jumlah jenis pelayanan spesialis di puskesmas rawat inap
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar
				Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai
					Persentase penemuan dan penanganan kasus TB
					Persentase keberhasilan pengobatan TB
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
					Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
					Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita
					Prevalensi anemia pada ibu hamil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk
					b. Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya
					c. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang bersertifikat Laik Higiene Sanitasi (Jasa boga, restoran/depot/RM,makanan jajanan,DAM)
					Persentase desa ODF
					Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya
					Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis
					Persentase Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1		2		4	5
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina
					Jumlah penyehat tradisional yang dibina
					Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA
					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart
					Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart
					Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart
					Persentase desa yang melaksanakan Posbindu
					Persentase sekolah yang melaksanakan KTR
					Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim
					Persentase penemuan kusta pada anak
					Persentase cacat pada kasus kusta baru
					Persentase penderita kusta RFT-MB
					Persentase penderita kusta RFT-PB
					Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP
					Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)
					Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart
					Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart
					Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B
					Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam
					Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif
					Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart
					Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)
					Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA
					Jumlah pengadaan urine test
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan Lainnya
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan
					Presentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
					Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella
				Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Presentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1		2		4	5
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan
					Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)
					Persentase keluarga yang mendapat intervensi
					Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi
					Persentase RS yang terakreditasi paripurna
					Persentase Klinik Utama yang terakreditasi
					Persentase lab Madya yang terakreditasi
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)
					Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS
					Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna
					Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi
					Jumlah lab Madya yang terakreditasi
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan
				Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan
				Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah nakes yang memiliki SIP/SIK yang berlaku pada faskes dibandingkan jumlah nakes yang terdaftar di sistem SISDMK Faskes tersebut
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi
				Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di Faskes Pemerintahan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standart ketenagakerjaan minimal di Faskes Pemerintahan
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM di Faskes Pemerintahan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK, AKLES DAN OPTIKAL, UMOT
					PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)
1		2		4	5
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN
					Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN
					JUMLAH APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DI BINA DAN DI AWASI
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	frekuensi kegiatan tim pokjanel tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media
					Persentase rumah tangga sehat (10 indikator)
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa
					Cakupan promosi kesehatan tingkat desa
					Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang
					Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)
					Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)
					Persentase poskestren purnama mandiri (PURI)
					persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)
					persentase desa-kelurahan siaga aktif
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Nilai Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	1.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	75%	78%	158.028.676.544,0	80%	170.784.817.408,00	90%	160.883.379.069,79	100%	161.725.948.415,43	100%	163.940.810.503,80	100%	165.749.556.141,51	100%	
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (pemerintah) yang terakreditasi Minimal Utama	1.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	64.244.000,00	100%	96.533.025,00	100%	109.028.000,00	100%	100.033.600,00	100%	108.440.320,00	100%	113.528.384,00	100%	
				1.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2 dokumen	2 dokumen	10.207.500,00	2 dokumen	14.980.025,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	18.000.000,00	2 dokumen	23.000.000,00	2 dokumen	
				1.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	15 laporan	15 laporan	54.036.500,00	15 laporan	81.553.000,00	15 laporan	94.028.000,00	15 laporan	85.033.600,00	15 laporan	90.440.320,00	15 laporan	90.528.384,00	15 laporan	
				1.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	95.443.523.917,00	100%	96.743.794.413,00	100%	97.946.713.627,79	100%	98.469.860.831,43	100%	100.041.371.190,80	100%	101.282.382.637,51	100%	
				1.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	93.185.453.317,00	100%	94.122.478.413,00	100%	95.431.590.352,79	100%	95.959.954.535,43	100%	97.391.945.440,80	100%	98.720.334.530,51	100%	
				1.02 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	93	93	1.901.650.000,00	95	2.200.956.000,00	95	2.095.877.625,00	95	2.091.011.500,00	95	2.110.352.000,00	95	2.125.159.600,00	95	
				1.02 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	93	93	356.420.600,00	95	420.360.000,00	95	419.245.650,00	95	418.894.796,00	95	539.073.750,00	95	436.888.507,00	95	
				1.02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	796.424.100,00	100%	11.815.506.150,00	100%	807.144.200,00	100%	757.501.410,00	100%	807.876.480,00	100%	758.270.300,00	100%	
				1.02 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	20	20	6.480.000,00	180	846.000.000,00	30	7.144.200,00	30	7.501.410,00	30	7.876.480,00	30	8.270.300,00	30	
				1.02 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	80%	789.944.100,00	80%	10.969.506.150,00	80%	800.000.000,00	80%	750.000.000,00	80%	800.000.000,00	80%	750.000.000,00	80%	
				1.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.437.627.500,00	100%	975.965.180,00	100%	573.157.500,00	100%	503.514.700,00	100%	1.196.501.500,00	100%	1.103.607.500,00	100%	
				1.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	20.545.750,00	2	10.714.300,00	2	800.000,00	2	900.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	17	17	1.035.474.250,00	10	191.727.000,00	10	190.750.000,00	20	150.000.000,00	20	850.000.000,00	20	750.000.000,00	20	
				1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	39.284.200,00	4	36.756.330,00	4	39.284.200,00	4	39.284.200,00	4	39.284.200,00	4	39.284.200,00	4	
				1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	80	80	219.271.300,00	90	191.871.400,00	90	219.271.300,00	90	190.278.500,00	90	183.165.300,00	90	190.271.300,00	90	
				1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	7	104.211.000,00	8	76.002.225,00	8	104.211.000,00	8	104.211.000,00	8	104.211.000,00	8	104.211.000,00	8	
				1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	2	3.900.000,00	3	4.080.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	
				1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	500	14.941.000,00	600	15.678.000,00	600	14.941.000,00	600	14.941.000,00	600	14.941.000,00	600	14.941.000,00	600	
				1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	150	150	145.000.000,00	200	449.135.925,00	200	449.135.925,00	250	449.135.925,00	250	449.135.925,00	250	449.135.925,00	250	
				1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.434.978.800,00	100%	973.865.730,00	100%	1.074.538.800,00	100%	1.079.538.800,00	100%	1.127.538.800,00	100%	1.186.538.800,00	100%	
				1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	12	1.440.000,00		0,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	
				1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	944.196.800,00	12	581.040.250,00	12	571.196.800,00	12	576.196.800,00	12	624.196.800,00	12	633.196.800,00	12	
				1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	118.000.000,00	12	120.000.000,00	12	118.000.000,00	12	118.000.000,00	12	118.000.000,00	12	118.000.000,00	12	
				1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	371.342.000,00	12	272.825.480,00	12	371.342.000,00	12	371.342.000,00	12	371.342.000,00	12	421.342.000,00	12	
				1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	542.331.600,00	100%	868.381.453,00	100%	369.589.470,00	100%	295.256.861,00	100%	138.840.000,00	100%	249.704.033,00	100%	
				1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	40.000.000,00	10	42.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	
				1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	237.591.600,00	10	280.900.000,00	10	137.000.000,00	10	37.500.000,00	10	39.090.000,00	10	45.500.000,00	10	
				1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	2	10.000.000,00	4	11.560.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	14.000.000,00	4	14.000.000,00	4	
				1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	146.000.000,00	12	171.112.000,00	12	103.250.000,00	12	17.756.861,00	12	3.750.000,00	12	13.000.000,00	12	
				1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	99.400.000,00	3	362.317.453,00	3	61.339.470,00	3	170.000.000,00	3	20.000.000,00	3	112.204.033,00	3	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.02 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	24.340.000,00	3	17.492.000,00	3	16.000.000,00	3	16.000.000,00	3	17.000.000,00	3	20.000.000,00	3	
				1.02 . 01 . 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	100%	100%	58.309.546.627,00	100%	59.310.771.457,00	100%	60.003.207.472,00	100%	60.520.242.213,00	100%	60.520.242.213,00	100%	61.055.524.487,00	100%	
				1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 puskesmas	37 puskesmas	58.309.546.627,00	37 puskesmas	59.310.771.457,00	37 puskesmas	60.003.207.472,00	37 puskesmas	60.520.242.213,00	37 puskesmas	60.520.242.213,00	37 puskesmas	61.055.524.487,00	37 puskesmas	
				1.02 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	1%	1%	116.425.582.823,00	2%	96.190.009.337,00	3%	92.192.747.079,12	5%	92.675.573.727,03	8%	93.944.780.164,08	10%	75.928.023.470,82	10%	
						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	12%		49%		55%		61%		67%		73%		73%	
						Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,14		0,17		0,2		0,23		0,26		0,29		0%	
						Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	78,5%		78,5%		78,5%		78,5%		85,7%		100,0%		100%	
						Persentase Nakestrad dan Hatra yang memiliki izin	15%	15%		17%		19%		21%		23%		25%		100,0%	
						AKI	83,8	83,6		79,23		79,23		79,23		79,23		79,23		79,23	
						AKB	7,1	7,1		6,9		6,8		6,7		6,6		6,5		6,5	
				1.02 . 02 . 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	30.162.343.334,00	100%	32.177.813.628,00	100%	43.399.856.170,12	100%	42.821.892.500,00	100%	42.254.914.500,08	100%	27.151.892.495,82	100%	
				1.02 . 02 . 2.01 . 02	Pembangunan puskesmas	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya		100%	5.083.879.500,00	100%	5.083.879.500,00	100%	5.083.879.500,00								
				1.02 . 02 . 2.01 . 06	Pengembangan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	5.229.496.500,00	38,1% (9/35)	13.306.886.900,00	38,5% (10/26)	9.150.000.000,00	50% (8/16)	9.300.000.000,00	50% (4/8)	6.200.000.000,00	100% (4/4)	5.160.000.000,00	100%	
				1.02 . 02 . 2.01 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100% (100/100)	100% (100/100)	6.890.861.300,00	100% (397/397)	1.260.674.250,00	100% (397/397)	3.829.927.350,12	100% (397/397)	4.300.000.000,00	100% (397/397)	4.300.000.000,00	100% (397/397)	4.100.000.000,00	100%	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas				100% (30/30)		100% (30/30)		100% (30/30)		100% (30/30)		100% (30/30)		100%	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas				100% (25/25)		100% (25/25)		100% (25/25)		100% (25/25)		100% (25/25)		100%	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas				100% (30/30)		100% (30/30)		100% (30/30)		100% (30/30)		100% (30/30)		100%	
				1.02 . 02 . 2.01 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75%	77%	9.743.972.329,00	82%	5.531.355.228,00	90%	21.500.000.000,00	100%	20.000.000.000,00	100%	22.200.022.000,08	100%	10.526.999.995,82	100%	
				1.02 . 02 . 2.01 . 15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	100 alat	100 alat		108 alat	99.100.000,00	113 alat	99.100.000,00	114 alat	99.100.000,00	110 alat	99.100.000,00	111 alat	99.100.000,00	111 alat	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan obat dengan tingkat aman	76%	76%	2.372.866.755,00	85%	4.410.174.950,00	88%	2.900.036.320,00	92%	3.150.000.000,00	95%	3.400.000.000,00	98%	2.950.000.000,00	98%	
						Jumlah item pengadaan obat , vaksin	50	50		50	50		50	50	50		50	50	50		50
				1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item pengadaan bahan habis pakai	7	7	5.611.550.450,00	7	2.124.784.800,00	7	5.657.152.500,00	7	5.707.152.500,00	7	5.782.152.500,00	7	4.132.152.500,00	7	
				1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alkes/alat penunjang medik	37 puskesmas	37 puskesmas	313.596.000,00	37 puskesmas	291.190.000,00	37 puskesmas	362.740.000,00	37 puskesmas	364.740.000,00	37 puskesmas	372.740.000,00	37 puskesmas	282.740.000,00	37 puskesmas	
				1.02.02.2.01.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Obat dan alkes yang di distribusikan dalam satu tahun	100%	100%	99.760.000,00	100%	69.768.000,00	100%	185.000.000,00	100%	185.000.000,00	100%	195.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	
				1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)	75%	78%	85.321.496.989,00	85%	62.749.182.754,00	93%	47.121.840.517,00	100%	48.263.335.779,03	100%	49.824.731.923,00	100%	47.142.166.081,00	100%	
						Persentase Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	57%	57%		60%		62%		70%		78%		86%		86%	
						Persentase tenaga kesehatan tradisional yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase penyehat tradisional yang dibina	24,7%	25,0%		27,0%		29,0%		31,0%		33,0%		35,0%		35,0%	
						Persentase desa yang terbentuk Asman TOGA	21,5%	22,0%		22,0%		24,0%		26,0%		28,0%		30,0%		30,0%	
						Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase akses sanitasi layak	23%	23%		40%		50%		80%		90%		100%		100%	
						Jumlah tingkatan tatanan dalam kabupaten sehat	6	6		7		8		10		10		10		10	
				1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil dilayani sesuai standart (K4)	89%	89%	342.260.000,00	90%	1.775.360.550,00	92%	467.533.650,00	94%	542.339.000,00	96%	629.113.200,00	100%	529.771.300,00	100%	
				1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin dilayani sesuai standart	92%	92%	63.140.000,00	94%	3.312.392.469,00	95%	114.430.500,00	96%	132.739.300,00	98%	153.977.500,00	100%	125.613.900,00	100%	
				1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir dilayani sesuai standart (KN2)	94%	94%	41.940.000,00	95%	137.786.501,00	96%	56.724.000,00	97%	65.799.800,00	98%	76.327.700,00	100%	57.540.000,00	100%	
				1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita dilayani sesuai standart	77%	77%	53.500.000,00	80%	711.377.500,00	84%	72.209.420,00	88%	83.762.900,00	92%	97.164.900,00	100%	75.711.200,00	100%	
				1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai standart	55%	55%	149.320.000,00	60%	523.694.700,00	70%	259.199.500,00	80%	231.071.400,00	90%	268.042.800,00	100%	260.929.600,00	100%	
				1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	71.980.000,00	100%	74.130.000,00	100%	99.929.900,00	100%	115.918.600,00	100%	134.465.500,00	100%	101.979.900,00	100%	
				1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standart	50%	50%	39.840.000,00	55%	197.278.275,00	60%	50.885.400,00	70%	59.027.000,00	80%	68.471.300,00	100%	59.426.700,00	100%	
				1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi dilayani sesuai standar	10,70%	10,70%	Rp 46.522.000,00	100%	45.461.000,00	100%	46.522.000,00	100%	45.461.000,00	100%	45.461.000,00	100%	45.461.000,00	100%	
				1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase penderita DM dilayani sesuai standar	48,00%	48,00%	Rp 20.208.000,00	100%	20.198.375,00	100%	20.208.000,00	100%	20.198.375,00	100%	20.198.375,00	100%	20.198.375,00	100%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	133%	0%	Rp. 49.928.000,00	100%	48.379.500,00	100%	49.928.000,00	100%	48.379.500,00	100%	48.379.500,00	100%	48.379.500,00	100%			
				1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	32%	32%	476.455.800,00	100%	147.730.275,00	100%	576.512.000,00	100%	594.163.000,00	100%	697.579.000,00	100%	667.337.000,00	100%			
						Persentase penemuan dan penanganan kasus TB	43%	43%				50%		55%			60%		65%		70%	70%	
						Persentase keberhasilan pengobatan TB	96%	96%				90%		90%			90%		90%		90%	90%	
				1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92%	92%	48.816.000,00	100%	153.590.000,00	100%	125.198.000,00	100%	137.718.000,00	100%	151.490.000,00	100%	129.639.000,00	100%			
						Persentase Orang dengan HIV yang mendapatkan ARV	89%	89%				90%		90%			90%		90%		90%	90%	
				1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi KLB	0%	100%	10.608.450.400,00	100%	10.308.452.000,00	100%	5.154.226.000,00	100%	5.154.226.000,00	100%	5.154.226.000,00	100%	5.154.226.000,00	100%	5.154.226.000,00		
				1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	88%	88%	745.320.000,00	90%	3.321.597.500,00	92%	1.002.902.500,00	94%	1.163.366.900,00	96%	1.349.505.600,00	100%	1.245.426.400,00				
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,35%	15,50%				15%		14,5%			13,5%		13%		13%	13%	
						Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	9%	9%				8,7%		8%			7%		6,7%		6,5%	6,5%	
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	26%	26%				24,0%		22%			20%		19,0%		18,0%	18,0%	
				1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Jumlah Pos UKK yang terbentuk	40 Pos	40 Pos	47.221.200,00	42 Pos	144.353.900,00	45 Pos	53.057.600,00	50 Pos	56.241.000,00	52 Pos	59.615.400,00	55 Pos	53.192.300,00	55 Pos	53.192.300,00	55 Pos	55 Pos
						b. Persentase jumlah jamaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya	80%	80%				90%		95%			100%		100%		100%	100%	
						c. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga	37 puskesmas	37 puskesmas				37 puskesmas		37 puskesmas			37 Puskesmas		37 Puskesmas		37 Puskesmas	37 Puskesmas	
				1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar	68,73%	68,73%	23.165.780.000,00	70,00%	3.438.404.050,00	72,00%	11.753.316.300,00	75,00%	12.771.688.834,03	78,00%	12.987.031.600,00	80%	11.997.572.000,00	80%			
						Persentase desa ODF	62,30%	62,30%				75,00%		100,00%			100,00%		100,00%		100%	100%	
						Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas airnya	78,20%	78,20%				80,00%		83,00%			85,00%		87,00%		90%	90%	
						Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis	70,00%	70,00%				85,00%		100,00%			100,00%		100,00%		100%	100%	
						Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	82,50%	82,50%				84,00%		86,00%			89,00%		90,00%		92%	92%	
				1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah tenaga kesehatan tradisional yang dibina	6	6	70.000.000,00	6	74.200.000,00	6	78.652.000,00	6	83.371.120,00	6	88.373.389,00	6	79.675.790,00	6			
						Jumlah penyehat tradisional yang dibina	355	360				388		416			445		474		503	503	
						Jumlah desa yang terbentuk Asman TOGA	74	74				76		78			80		82		84	84	
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan yankestrad	37	37				37		37			37		37		37	37	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1.02.02.2020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase KLB yang ditanggulangi ≤ 24 jam	100%	100%	45.085.800,00	100%	6.044.850,00	100%	54.553.818,00	100%	60.009.200,00	100%	66.010.120,00	100%	55.611.130,00	100%		
						Penemuan kasus AFP	0	0		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
						Penemuan kasus suspect campak	0	0		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
				1.02.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ ditangani sesuai standart	100%	100%	133.530.000,00	100%	195.205.825,00	100%	150.021.000,00	100%	159.000.000,00	100%	168.540.000,00	100%	156.652.000,00	100%		
				1.02.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita HT ditangani sesuai standart	10,7%	10,7%	863.029.300,00	100%	4.593.689.750,00	100%	1.030.959.000,00	100%	1.127.132.000,00	100%	1.232.506.000,00	100%	1.191.939.110,00	100%		
						Persentase Penderita DM ditangani Sesuai standart	48,0%	48,0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase WNI usia 15 - 59 tahun mendapatkan screening sesuai standart	14,3%	14,3%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase desa yang melaksanakan Posbindu	88,6%	88,6%		60%	70%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Persentase sekolah yang melaksanakan KTR	44,6%	44,6%		60%	70%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Wanita Usia Subur yang melakukan deteksi dini penyakit Kanker payudara dan kanker leher rahim pada usia 30 sd 50 tahun	3,2%	3,2%		16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	80%	
						Persentase penemuan kusta pada anak	2%	<5%		<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
						Persentase cacat pada kasus kusta baru	5%	<5%		<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
						Persentase penderita kusta RFT-MB	100%	95,0%		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
						Persentase penderita kusta RFT-PB	100%	100,0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase cakupan tatalaksana pneumonia balita	35%	40,0%		45%	50%	50%	50%	50%	55%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standart	80%	80,0%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan / sosialisasi Pengendalian PISP	55%	60,0%		65%	70%	70%	70%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
						Persentase Puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	60,0%	65,0%		70%	80%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Kasus Diare pada semua umur ditangani sesuai standart	40,0%	50,0%		60%	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
						Persentase Kasus Diare pada Balita ditangani sesuai standart	35,0%	40,0%		50%	60%	60%	60%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
						Persentase Bumil dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	60,0%	70,0%		75%	80%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase bayi lahir dari Ibu reaktif HBsAg mendapat HBIg < 24 jam	80,0%	100,0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase bayi usia 9-12 bulan yang mendapat HBIg di test HBsAg hasilnya Non Reaktif	80,0%	100,0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase kasus DBD ditangani sesuai standart	100,0%	100,0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	>= 77 %	>=80%		>=85%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 95%		≥ 95%		≥ 95%	
						Persentase anak usia 1-12 Tahun mendapatkan obat Cacing	99,0%	100,0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				1.02 . 02 . 2.02 . 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk dalam data base yang memiliki jaminan kesehatan	70%	70%	23.685.588.999,00	85%	23.674.534.999,00	100%	23.674.534.999,00	100%	23.674.534.999,00	100%	23.674.534.999,00	100%	23.674.534.999,00	100%	
				1.02 . 02 . 2.02 . 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah masyarakat /tokoh masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan NAPZA	0	0	110.244.750,00	30 orang	110.244.700,00	60 orang	130.000.000,00	90 orang	140.000.000,00	120 orang	150.000.000,00	150 orang	135.000.000,00	150 orang	
						Jumlah pengadaan urine test	300	300		350		400		450		500		550		550	
				1.02 . 02 . 2.02 . 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen ≤ 24 jam ke laboratorium pemeriksa	100%	100%	16.575.000,00	100%	13.487.760,00	100%	20.055.750,00	100%	22.061.325,00	100%	24.267.458,00	100%	21.694.203,00	100%	
				1.02 . 02 . 2.02 . 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan sehat	18 Kec.	18 Kec.	238.080.000,00	20 Kec	304.509.950,00	24 Kec	267.506.600,00	26 Kec	283.556.900,00	26 Kec	300.570.300,00	26 Kec	318.604.500,00	26 Kec	
				1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan preventif promotif, layanan persalinan	37 pkm	37 pkm	31.741.423.140,00	37 pkm	2.047.371.975,00	37 pkm	4.241.423.140,00	37 pkm	3.741.423.140,00	37 pkm	4.241.423.140,00	37 pkm	2.941.423.140,00	37 pkm	
				1.02 . 02 . 2.02 . 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan	37 puskesmas	37 puskesmas	16.317.156.220,00	37 puskesmas	4.434.800.500,00	37 puskesmas	4.434.800.500,00	37 puskesmas	4.234.800.500,00	37 puskesmas	4.434.800.500,00	37 puskesmas	1.434.800.500,00	37 puskesmas	
				1.02 . 02 . 2.02 . 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Dengan Kelulusan Akreditasi Minimal Utama	21 puskesmas	21 puskesmas	2.054.705.000,00	22 puskesmas	2.548.292.925,00	23 puskesmas	2.701.190.580,00	26 puskesmas	2.863.262.015,00	29 puskesmas	3.035.057.736,00	32 puskesmas	3.117.161.200,00	32 puskesmas	
				1.02 . 02 . 2.02 . 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	341	341	1.117.662.000,00	341	337.452.975,00	341	141.044.860,00	341	155.149.346,00	341	170.664.281,00	341	145.730.709,00	341	
						Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	92,9%	92,9%		93,6%		94,1%		94,6%		95,0%		96,0%		96,0%	
						Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak dan Rubella	76,4%	76,4%		81,0%		85,6%		90,3%		95,0%		96,0%		96,0%	
				1.02 . 02 . 2.02 . 37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	0,0%	100,0%	49.160.000,00	100,0%	49.159.950,00	100,0%	73.739.925,00	100,0%	73.739.925,00	100,0%	73.739.925,00	100,0%	73.739.925,00	100,0%	
				1.02 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	37 pkm	37 pkm	128.200.000,00	37 pkm	109.820.000,00	37 pkm	150.000.000,00	37 pkm	115.000.000,00	37 pkm	125.000.000,00	37 pkm	115.000.000,00	37 pkm	
				1.02 . 02 . 2.03 . 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	64.000.000,00	38 dokumen	45.540.000,00	38 dokumen	75.000.000,00	38 dokumen	50.000.000,00	38 dokumen	55.000.000,00	38 dokumen	50.000.000,00	38 dokumen	
				1.02 . 02 . 2.03 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang terpelihara dan puskesmas yang menggunakan simpus dan e-SPM	2 jaringan 37 pkm	2 jaringan 37 pkm	64.200.000,00	2 jaringan 37 pkm	64.280.000,00	2 jaringan 37 pkm	75.000.000,00	2 jaringan 37 pkm	65.000.000,00	2 jaringan 37 pkm	70.000.000,00	2 jaringan 37 pkm	65.000.000,00	2 jaringan 37 pkm	
				1.02 . 02 . 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	100%	813.542.500,00	100%	1.153.192.955,00	100%	1.371.050.392,00	100%	1.360.345.448,00	100%	1.615.133.741,00	100%	1.403.964.894,00	100%	
						Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	5,4%	5,4%		10,8%		16,2%		21,6%		27%		32,4%		32,4%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Persentase keluarga yang mendapat intervensi	5,5%	5,5%	10,0%		15,0%		20,0%		25,0%		30,0%		30,0%		
						Persentase Klinik Pratama yg terakreditasi	0%	0%	10%		20%		31%		41%		52%		52%		
						Persentase RS yang terakreditasi paripurna	21,43%	21,43%	27,27%		36,36%		45,45%		54,55%		63,64%		63,64%		
						Persentase Klinik Utama yang terakreditasi	0%	0%	0%		0%		0%		33,33%		100%		100%		
						Persentase lab Madya yang terakreditasi	0%	0%	0%		0%		0%		0%		100%		100%		
				1.02 . 02 . 2.04 . 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	2 puskesmas	2 puskesmas	4 puskesmas	645.948.195,00	6 puskesmas	711.205.092,00	8 puskesmas	683.877.398,00	10 puskesmas	799.110.041,00	12 puskesmas	727.056.644,00	12 puskesmas		
						Jumlah keluarga yang mendapat intervensi sesuai hasil survey KS	22.402 keluarga	22.402 keluarga	40,635 keluarga		60,935 keluarga		81.271 keluarga		121.907 keluarga		121.907 keluarga		121.907 keluarga		
						Jumlah Klinik Pratama yg terakreditasi	0 klinik	0 klinik	5 klinik		10 klinik		15 klinik		20 klinik		25 klinik		25 klinik		
				1.02 . 02 . 2.04 . 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang terakreditasi paripurna	3	3	4	180.572.500,00	507.244.760,00	4	659.845.300,00	5	676.468.050,00	6	816.023.700,00	7	676.908.250,00	7	
						Jumlah Klinik Utama yang terakreditasi	0	0	0		0		0		1		3		3		
						Jumlah lab Madya yang terakreditasi	0	0	0										1		
				01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	70%	70%	85%	2.791.819.050,00	100%	2.614.268.585,95	100%	2.627.959.886,02	100%	2.663.950.206,55	100%	2.153.057.077,20	100%		
				01.02.03.2.01	Pemberian izin praktek kesehatan tenaga kesehatan di kabupaten / kota	Jumlah izin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan	100%	100%	100%	19.962.900,00	100%	20.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%		
				01.02.03.2.01.01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Perizinan praktik tenaga kesehatan terkendali	100%	100%	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%		
				01.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui faskes dan organisasi profesi	100%	100%	100%	9.962.900,00	100%	10.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%		
				01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	100%	100%	2.762.856.150,00	100%	2.294.268.585,95	100%	2.237.959.886,02	100%	2.223.950.206,55	100%	1.663.057.077,20	100%		
				01.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	9.976.125,00	100%	10.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%		
				01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas	100%	100%	100%	2.742.976.125,00	100%	2.269.268.585,95	100%	2.197.959.886,02	100%	2.178.950.206,55	100%	1.613.057.077,20	100%		
				01.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	100%	100%	9.903.900,00	100%	15.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%		
				01.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan terlaksana	100%	100%	100%	9.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				01.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahun	60	60	-	60	9.000.000,00	60	300.000.000,00	60	350.000.000,00	60	400.000.000,00	60	450.000.000,00	300	
				1.02 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	75%	636.967.000,00	75%	652.986.525,00	75%	618.914.692,61	75%	622.156.073,58	75%	630.676.561,56	75%	509.725.231,30	75%	
						PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		75%	
				1.02 . 04 . 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN	20	20	106.119.000,00	20	75.488.825,00	20	101.000.000,00	20	125.000.000,00	20	130.000.000,00	20	110.000.000,00	20	
						Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina dan diawasi	25%	25%		27%		30%		32%		35%		40%		40%	
				1.02 . 04 . 2.01 . 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG MEMENUHI PERSYARATAN	20	20	106.119.000,00	20	75.488.825,00	20	101.000.000,00	20	125.000.000,00	20	130.000.000,00	20	110.000.000,00	20	
						JUMLAH APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DI BINA DAN DI AWASI	40	40		45		48		50		53		55		55	
				1.02 . 04 . 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN	120	120	316.955.000,00	123	261.324.800,00	126	200.210.000,00	129	220.210.000,00	132	235.145.000,00	135	200.265.000,00	135	
				1.02 . 04 . 2.03 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produsen industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya	120	120	316.955.000,00	123	261.324.800,00	126	200.210.000,00	129	220.210.000,00	132	235.145.000,00	135	200.265.000,00	135	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				1.02 . 04 . 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	3%	3%	213.893.000,00	3%	316.172.900,00	3,77%	317.704.692,61	4,02%	276.946.073,58	4,28%	265.531.561,56	4,53%	199.460.231,30	4,53%	
				1.02 . 04 . 2.06 . 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	213.893.000,00	100%	316.172.900,00	100%	317.704.692,61	100%	276.946.073,58	100%	265.531.561,56	100%	199.460.231,30	100%	
				1.02 . 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	65,03%	65,03%	479.473.200,00	66%	3.569.941.025,00	67%	3.383.720.527,73	68%	3.401.441.557,35	69%	3.448.024.830,01	70%	2.786.761.646,10	70%	
				1.02 . 05 . 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	frekuensi kegiatan tim pokjanel tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	91.600.000,00	2 kali dalam 1 tahun	626.451.475,00	2 kali dalam 1 tahun	302.922.000,00	2 kali dalam 1 tahun	309.098.000,00	2 kali dalam 1 tahun	309.098.000,00	2 kali dalam 1 tahun	302.583.000,00	2 kali dalam 1 tahun	
				1.02 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah lintas sektor/ organisasi masyarakat/ organisasi profesi/ dunia usaha yang bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	2 MOU/PKS	91.600.000,00	2 MOU/PKS	626.451.475,00	2 MOU/PKS	302.922.000,00	2 MOU/PKS	309.098.000,00	2 MOU/PKS	309.098.000,00	2 MOU/PKS	302.583.000,00	10 MOU/PKS	
				1.02 . 05 . 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun	5	5	323.137.200,00	5	2.304.254.250,00	5	2.463.076.200,00	5	2.484.860.200,00	5	2.507.952.200,00	5	2.332.429.200,00	5	
				1.02 . 05 . 2.02 . 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah tema KIE program prioritas yang dipromosikan melalui media	5	5	323.137.200,00	5	2.304.254.250,00	5	2.463.076.200,00	5	2.484.860.200,00	5	2.507.952.200,00	5	2.332.429.200,00	5	
						Persentase rumah tangga sehat (10 indikator)	60%	60%		63%		63%		65%		65%		67%		67%	
				1.02 . 05 . 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala desa	100%	100%	64.736.000,00	100%	639.235.300,00	100%	617.722.327,73	100%	607.483.357,35	100%	630.974.630,01	100%	151.749.446,10	100%	
						Cakupan promosi kesehatan tingkat desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	87,36%	87,36%		88,00%		88%		89%		89%		90%		90%	
						Persentase poskesdes purnama mandiri (PURI)	15,22%	15%		16,00%		18%		19%		21%		22%		22%	
						persentase poskestren purnama mandiri (PURI)	30,43%	30,43%		39,00%		47%		56%		65%		74%		74%	
						persentase saka Bhakti Husada (SBH) purnama Mandiri (PURI)	14,71%	14,71%		15,00%		20%		26%		32%		38%		38%	
						persentase desa-kelurahan siaga aktif	15,22%	15%		16,00%		18%		19%		21%		22%		22%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1.02 .05 . 2.03 .01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	frekuensi bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang dilakukan selama satu tahun	2	2	64.736.000,00	6	639.235.300,00	6	617.722.327,73	6	607.483.357,35	6	630.974.630,01	6	151.749.446,10	6	
JUMLAH TOTAL									275.570.699.567,00		273.989.573.345,00		259.693.029.955,20		261.053.079.659,41		264.628.242.266,00		247.127.123.566,93		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
RSUD KABUPATEN KEDIRI																					
							JUMLAH TOTAL	240.179.326.643,17		250.404.017.868,00		290.855.574.500,00		303.359.425.672,00		302.537.563.647,00		265.865.851.404,00	1.653.201.759.734,17		
						Non Urusan		222.879.326.643,17		227.891.597.868,00		255.843.154.500,00		268.347.005.672,00		263.025.143.647,00		220.853.431.404,00	1.458.839.659.734,17		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	69%	70%	222.879.326.643,17	75%	227.891.597.868,00	76%	255.843.154.500,00	78%	268.347.005.672,00	79%	263.025.143.647,00	80%	220.853.431.404,00	
							Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	Paripurna	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	28.739.088.735,00	100,00%	31.691.597.868,00	100,00%	38.029.917.441,00	100,00%	45.635.900.929,00	100,00%	49.058.593.488,00	100,00%	51.511.523.164,00	
							Peningkatan Pelayanan BLUD														
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	194.140.237.908,17	Paripurna	196.200.000.000,00	Paripurna	217.813.237.059,00	Paripurna	222.711.104.743,00	Paripurna	213.966.550.159,00	Paripurna	169.341.908.240,00	
						Urusan Kesehatan															
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	100%	100%	17.300.000.000,00	100%	22.512.420.000,00	100%	35.012.420.000,00	100%	35.012.420.000,00	100%	39.512.420.000,00	100%	45.012.420.000,00	
							Persentase realisasi anggaran Jamkesda	0%	90%		92%		94%		96%		98%		99%	99%	
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota															
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	100%	100%	2.000.000.000,00		-	100%	9.500.000.000,00	100%	9.500.000.000,00	100%	9.500.000.000,00	100%	9.500.000.000,00	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	7.012.420.000,00	100%	7.012.420.000,00	100%	7.012.420.000,00	100%	7.012.420.000,00	100%	7.012.420.000,00	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran Jamkesda														
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase realisasi anggaran Jamkesda	0%	90%	15.300.000.000,00	92%	15.500.000.000,00	94%	18.500.000.000,00	96%	21.000.000.000,00	98%	23.500.000.000,00	99%	25.500.000.000,00	
RSUD SLG																					
							JUMLAH TOTAL	79.321.219.888,00		113.781.744.145,00		132.162.633.975,00		137.844.291.995,00		137.470.843.936,00		120.807.487.591,00	779.672.636.780,60		
						Non Urusan		64.536.807.128,00		76.688.571.904,00		82.794.451.267,00		89.435.269.678,00		96.660.738.593,00		102.390.880.539,00	661.948.229.945,41		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	75%	75%	64.536.807.128,00	80%	76.688.571.904,00	85%	82.794.451.267,00	90%	89.435.269.678,00	95%	96.660.738.593,00	100%	102.390.880.539,00	
						Urusan Kesehatan															
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	68%	70%	14.734.412.760,00	75%	37.038.172.241,00	80%	49.313.182.708,00	85%	48.354.022.317,00	90%	40.755.105.343,00	100%	18.361.607.052,00	
							Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama		Utama		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	Paripurna	
							Persentase realisasi anggaran Jamkesda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Tenaga Kesehatan yang sudah mengikuti Pelatihan	72%	75%	50.000.000,00	80%	55.000.000,00	85%	55.000.000,00	90%	55.000.000,00	95%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	385.780.500,00

The background features a light gray gradient with various geometric elements. In the top right corner, there is a large, stylized target symbol composed of concentric circles and radial lines. On the left side, there are several overlapping, 3D-style square and diamond shapes in shades of gray. The overall design is clean and professional.

RENCANA STRATEGIS

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021- 2026**



RENCANA STRATEGIS

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021- 2026**